

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN**

**(Studi Pada Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji,
Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**PARADITYA GALANG ALBYANANDA
125030100111042**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2016

MOTTO

“Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil, dan berhasillah kau; anggap semua pelajaran mudah, dan semua akan jadi mudah; jangan takut pada pelajaran apa pun, karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal yang akan membodohkan semua”

(Pramoedya Ananta Toer)

“Benar atau salah itu relatif. Jangan merasa benar ataupun takut salah, yang kau takutkan itu hanya soal spekulasi satu atau dua individu, sedangkan hidupmu jauh lebih luas dari itu.”

(Albyananda)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga kecil sederhana saya. Kedua orang tua saya Mama Sri Lestari dan Ayah Bambang Tri Mulyanta, saudara saya Dek Arga Bestari (alm), Mbak Azalea Riztri Adyasa Wichita, dan Dek Ananta Daffa Ayodyatantra.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Studi Pada Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)

Disusun Oleh : Paraditya Galang Albyananda

NIM : 125030100111042

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 15 November 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, M.S

Dr. Mochammad Makmur, M.S

NIP. 19540704 198103 1 003

NIP. 19511028 198003 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Desember 2016
Jam : 10.00 – 11.00 WIB
Skripsi Atas nama : Paraditya Galang Albyananda
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Studi pada Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



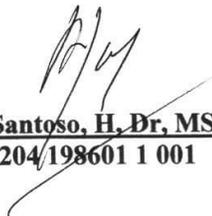
Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, M.S
NIP. 19540704 198103 1 003

Anggota



Dr. Mochammad Makmur, M.S
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota

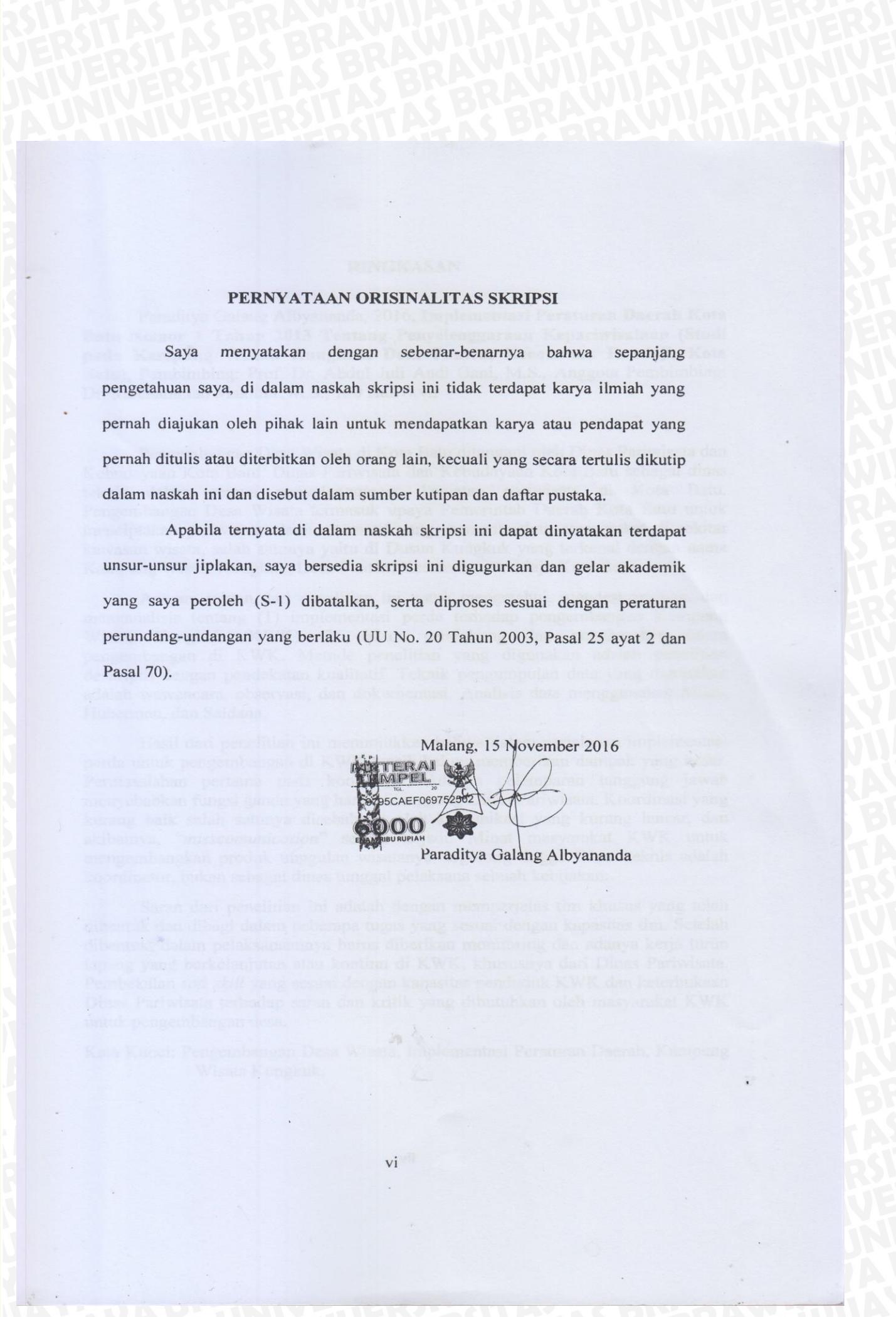


Bambang Santoso, H. Dr, MS
NIP. 19610204 198601 1 001

Anggota



Rendra Eko Wismanu, S. AP, M.AP
NIP. 20111078512141001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dinyatakan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 15 November 2016



Paraditya Galang Albyananda

RINGKASAN

Paraditya Galang Albyananda, 2016, **Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Studi pada Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)**, Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, M.S., Anggota Pembimbing: Dr. Mochammad Makmur, M.S., 120 Hal.+xvii

Pengembangan Desa Wisata di Kota Batu ditangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai dinas teknis dalam semua penyelenggaraan kegiatan pariwisata di Kota Batu. Pengembangan Desa Wisata termasuk upaya Pemerintah Daerah Kota Batu untuk menciptakan pariwisata alami alternatif yang memanfaatkan masyarakat di sekitar kawasan wisata, salah satunya yaitu di Dusun Kungkuk yang terkenal dengan nama Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang (1) implementasi perda terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) (2) faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan di KWK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan implementasi perda untuk pengembangan di KWK masih belum memberikan dampak yang besar. Permasalahan pertama pada koordinasi. Adanya pelemparan tanggung jawab menyebabkan fungsi ganda yang harus ditanggung Dinas Pariwisata. Koordinasi yang kurang baik salah satunya disebabkan oleh komunikasi yang kurang lancar, dan akibatnya, “*misscommunication*” sering terjadi. Minat masyarakat KWK untuk mengembangkan produk unggulan wisatanya tergolong tinggi. Dinas teknis adalah koordinator, bukan sebagai dinas tunggal pelaksana sebuah kebijakan.

Saran dari penelitian ini adalah dengan memperjelas tim khusus yang telah dibentuk dan dibagi dalam beberapa tugas yang sesuai dengan kapasitas tim. Setelah dibentuk, dalam pelaksanaannya harus diberikan monitoring dan adanya kerja turun lapang yang berkelanjutan atau kontinu di KWK, khususnya dari Dinas Pariwisata. Pembekalan *soft skill* yang sesuai dengan kapasitas penduduk KWK dan keterbukaan Dinas Pariwisata terhadap saran dan kritik yang dibutuhkan oleh masyarakat KWK untuk pengembangan desa.

Kata Kunci: Pengembangan Desa Wisata, Implementasi Peraturan Daerah, Kampung Wisata Kungkuk.

SUMMARY

Paraditya Galang Albyananda, 2016, **Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Studi pada Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)**, Supervisor: Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, M.S., Co-Supervisor: Dr. Mochammad Makmur, M.S., 120 Page.+xvii

The Development of Tourism Village in Batu handled by the Department of Tourism and Culture in Batu. The Department of Tourism and Culture Batu City is the technical agency in maintaining every tourism activity in Batu city. Tourism Village development is the attempt of Batu City Government to create an alternative natural tourism which utilizes the societies around the tourist areas, one of them is the Kungkuk village that well-known as the Kungkuk Tourism Village, Punten, Bumiaji, Batu City.

The purpose of this study are to examining, describing and analyzing (1) the implementation of the government regulations on the development of Kungkuk Tourism Village (KWK) (2) the obstacles and supporting factors in the development of KWK. The method used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The Data collection techniques using interviews, observation, and documentation and the Analysis of the data using Miles, Huberman, and Saldana.

The results of this study shows that in the course of the implementation of the government regulations for the development of KWK still do not have a great impact. The first problem is the lack of coordination. There is ejection in responsibility which causing double function that must be handled by the Department of Tourism. This poor coordination is caused by the lack of good communication and the consequent is often occurring miscommunication. The desire of KWK societies in developing their featured product is high. The Technical Department as the coordinator, is not a single agency that implement a policy.

The suggestion of this study is to improve the ability of the special team that has been formed and divided into a number of tasks which suitable for the capacity of the team. After established, in the implementation, it should be monitored and have continuous fieldwork in KWK, especially from the Department of Tourism. Soft skills briefing that fit the capacity of KWK societies and the openness of Tourism Department for suggestions and criticism are needed by KWK societies for village development.

Keywords: Tourism Village Development, Implementation of the government regulations, Kungkuk Tourism Village.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Studi Pada Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)”. Skripsi ini adalah tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

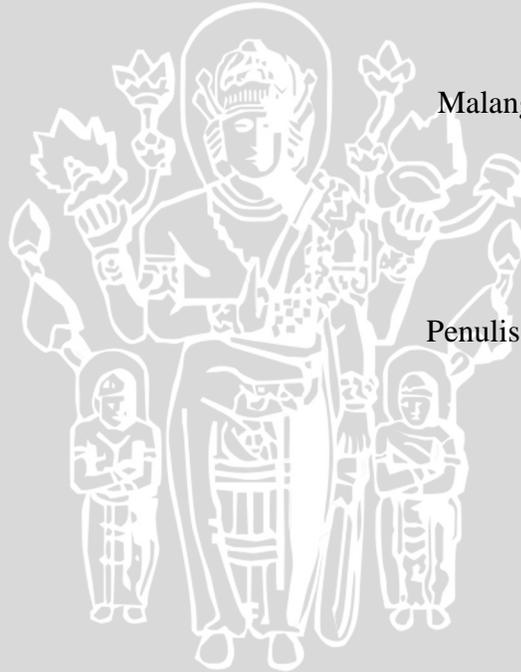
1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Choirul Saleh, M. Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, M.S., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan baik secara teknis, teoritis, maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Mochammad Makmur, M.S., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan baik secara teknis, teoritis, maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Bapak Sariono selaku Kasubid Pariwisata dan Pertanian Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Batu yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
8. Bapak Muljo Adji selaku Kasie Bimbingan dan Pelatihan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
9. Bapak Suwito Pamungkas selaku Kepala Lembaga Koordinator Pariwisata Dusun Kungkuk dan Sekretaris Umum Kelompok Sadar Wisata Desa Punten yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
10. Mama Sri Lestari dan Ayah Bambang Tri Mulyanta, selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan doa dan dukungan moral serta dukungan materi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
11. Saudara-saudara penulis (Alm) Arga Bestari, Azalea Riztri Adyasawichita, dan Ananta Daffa Ayodyatantra yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Debby Berlian, yang bersedia memberikan waktu yang lebih, semangat, dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Humanistik 2012 Zeva, Niki, Fadil, Adam, Afin, Fahmi, Isa, Mila, Danang, Wanda, Denny, Fahrur, Eny, April, Fanny, Finna, Hanir, Dathul, Indah, Amel, Ihya, Rani, Qonita, Rafiq, Rahma, Danur, Odhi, Velli, Robeth, Riki, Reza, Ratna, Wiwid, Wida, dan Yessa yang telah menjadi suporter tanpa bayaran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Punggawa Advokat Humanistik Zeva, Niki, Fadil, Adam, Khezia, Dany, Bella, Ifa, Reyhan, Mas Dika, Mba Tika, dan Nanda sebagai teman berproses penulis selama berada di himpunan.
15. Seluruh Keluarga Besar Humanistik FIA UB yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis di Kota Malang.

16. Teman bermain dan belajar Linggar, Yoga, Aisyatush, Tyas, Galih, Adit, Mba Rahma, Yuni, Arlin, Ndut, Lingga, dan Agung yang bersedia menjadi *cheerleaders* bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini.
17. Dan juga semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan secara keseluruhan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 9 Desember 2016



Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Motto	ii
Lembar Persembahan.....	iii
Tanda Persetujuan Skripsi.....	iv
Lembar Pengesahan Skripsi.....	v
Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	vi
Ringkasan	vii
Summary	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik.....	11
B. Kebijakan Publik.....	13
1. Implementasi Kebijakan Publik	15
2. Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III.....	16
C. Konsep <i>Governance</i>	28
1. Definisi <i>Governance</i>	28
2. Karakteristik <i>Good Governance</i>	31
3. Unsur-unsur <i>Good Governance</i>	32
4. Teori Transformatif <i>Good Governance</i>	34
5. Karakteristik <i>Sound Governance</i>	34
6. Level <i>Sound Governance</i>	35
7. Konsep Sinergi	36
8. Konsep Kemitraan.....	40
D. Pariwisata	44
1. Pengertian Pariwisata	44
2. Jenis-jenis Pariwisata	45

3. Peranan Pariwisata dalam Pembangunan.....	47
4. Perencanaan dan Pengelolaan Industri Pariwisata	48
5. Pengembangan Industri Pariwisata	50
6. Desa Wisata.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Fokus Penelitian.....	57
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	58
D. Sumber Data Penelitian.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Instrumen Penelitian.....	63
G. Analisis Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

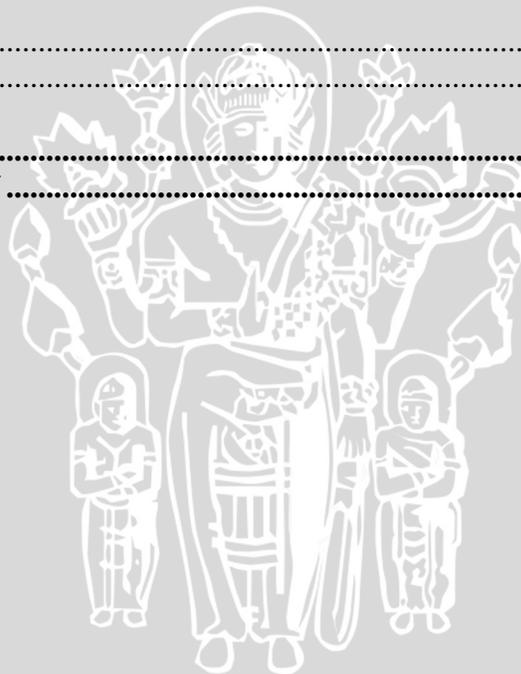
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	67
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Batu.....	67
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu	74
3. Gambaran Umum Situs Penelitian Pengelolaan Kampung Wisata Kungkuk (KWK).....	76
4. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan	79
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	81
1. Implementasi Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Pengembangan Kampung Wisata Kungkuk.....	81
a. Komunikasi antar aktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013	84
b. Sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013	86
c. Disposisi para pelaku Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013.....	95
d. Struktur birokrasi pelaksana Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013.....	96
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Perda Terhadap Pengembangan Kampung Wisata Kungkuk	98
a. Faktor Pendukung	98
b. Faktor Penghambat.....	103
C. Pembahasan dan Analisis Data	108
1. Implementasi Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap	

2. Pengembangan Kampung Wisata Kungkuk.....	108
a. Komunikasi antar aktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013	108
b. Sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013	111
c. Disposisi para pelaku Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013.....	118
d. Struktur birokrasi pelaksana Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013	120
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Perda Terhadap Pengembangan Kampung Wisata Kungkuk	121
a. Faktor Pendukung	121
b. Faktor Penghambat.....	123

**BAB V
PENUTUP**

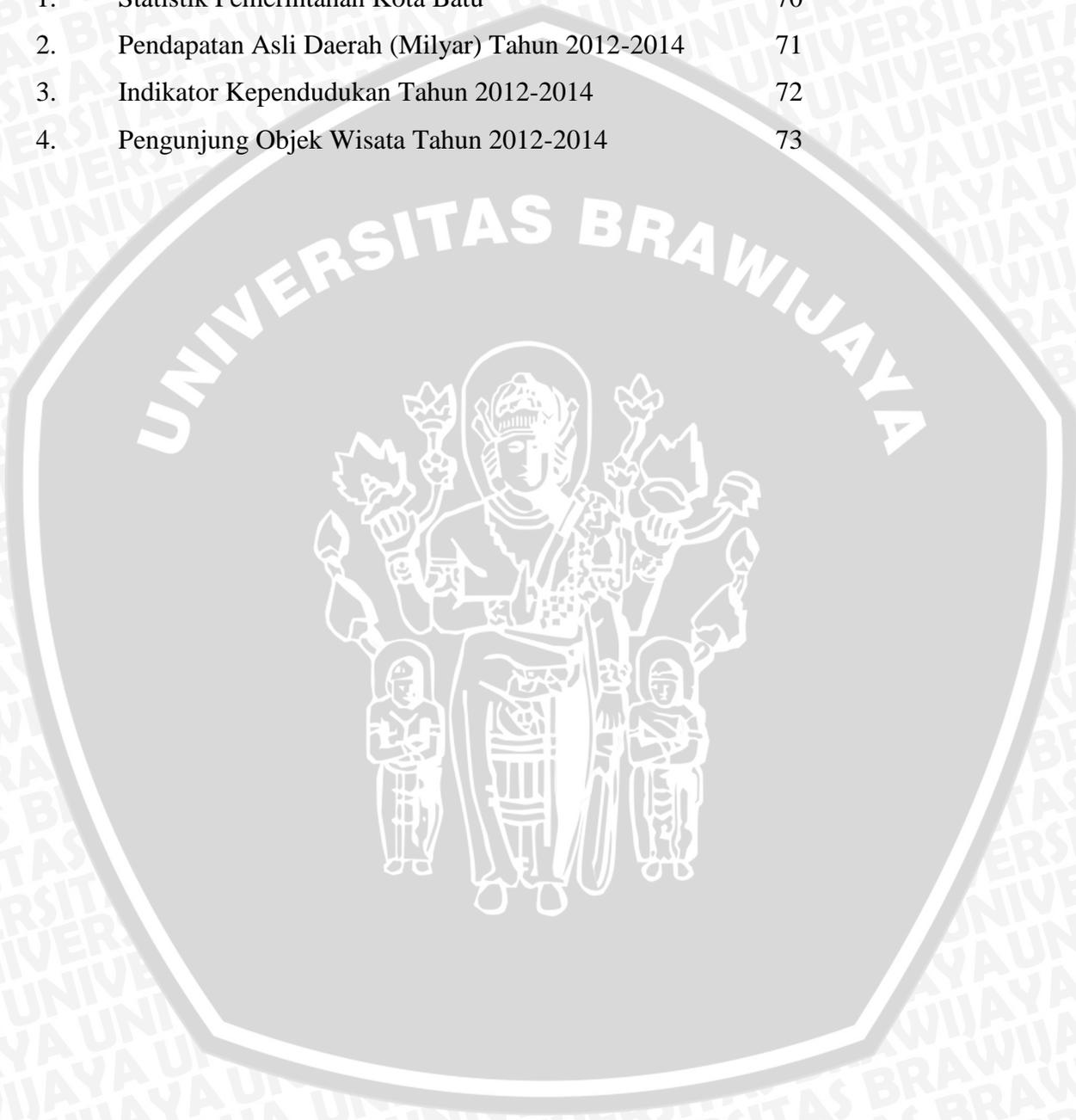
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA	132
DAFTAR LAMPIRAN	135



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Statistik Pemerintahan Kota Batu	70
2.	Pendapatan Asli Daerah (Milyar) Tahun 2012-2014	71
3.	Indikator Kependudukan Tahun 2012-2014	72
4.	Pengunjung Objek Wisata Tahun 2012-2014	73



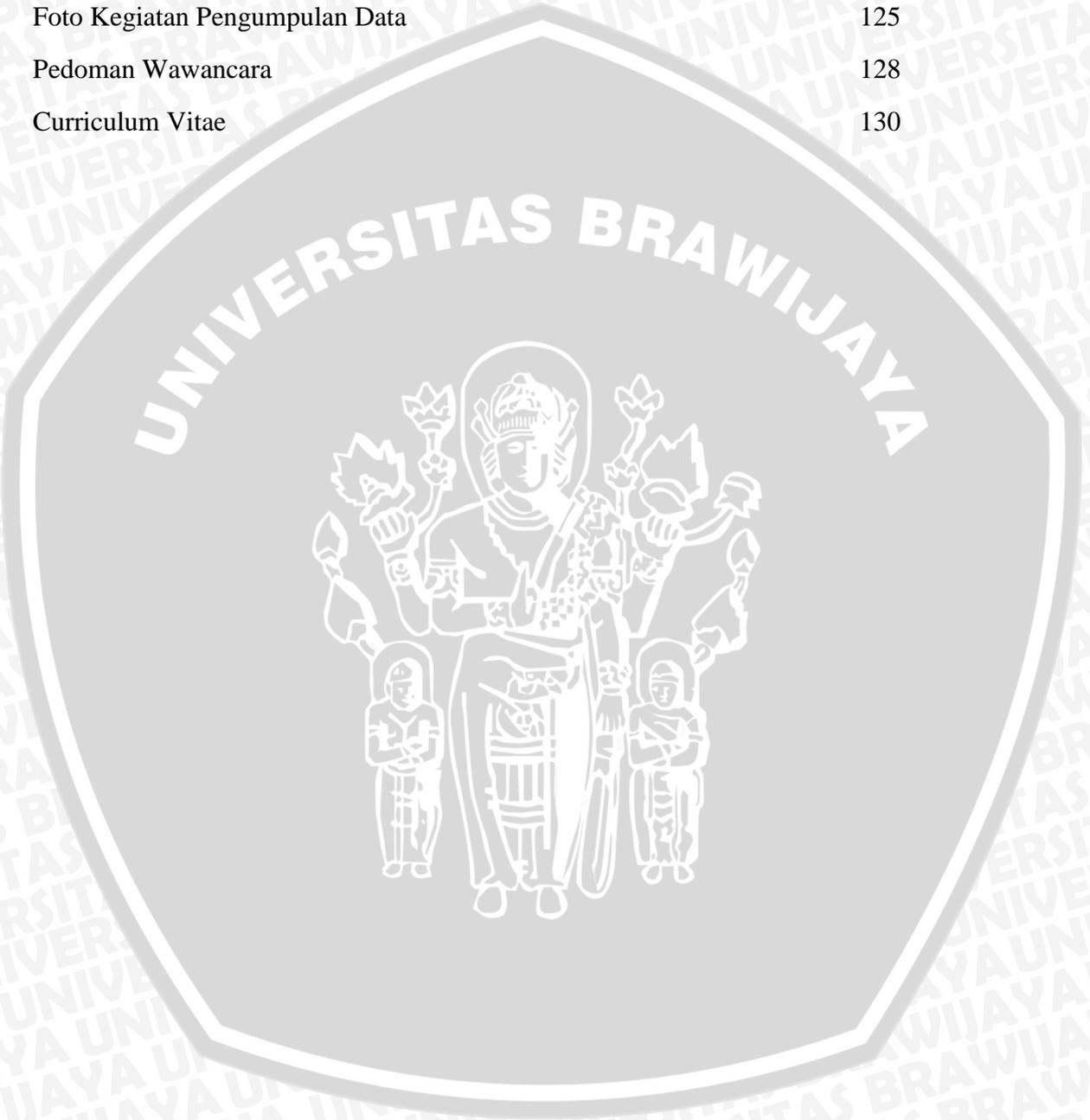
DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Dampak Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi	26
2.	Analisis Data Model Interaktif	65
3.	Peta Kota Batu	67
4.	APBD Kota Batu 2017	89
5.	Penunjuk Arah Masuk ke KWK	92
6.	Gapura Selamat Datang	92
7.	Toilet Umum	93
8.	Wisata Home Industri Keripik	93
9.	Jalur Motor <i>Trail</i> yang Menjadi Wisata Andalan KWK	99
10.	<i>View</i> Kota Batu dari <i>Camp Ground</i> di KWK	100
11.	Wisata Peternakan Kuda	100
12.	Kebun Mawar	101



DAFTAR LAMPIRAN

Judul	Hal
Foto Kegiatan Pengumpulan Data	125
Pedoman Wawancara	128
Curriculum Vitae	130



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional berhubungan erat dengan pembangunan daerah. Tujuan dari pembangunan nasional yaitu untuk mencapai masyarakat yang madani dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dari berbagai bidang, yaitu pada bidang IPTEK, budaya, pelayanan, dan juga pemenuhan sarana dan prasarana. Dimaksudkan oleh Soekanto, (2007:358) tentang pembangunan nasional yaitu “Pembangunan Nasional di Indonesia merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun masyarakat”. Jika kesejahteraan sosial merupakan cita-cita pemerintah saja, tentu akan sulit diraih. Masyarakat juga harus mempunyai cita-cita yang sama dan sinergi dengan pemerintah untuk memperlancar laju roda pembangunan menuju kesejahteraan, yaitu dengan cara partisipasi aktif masyarakat terhadap program-program pemerintah.

Produktivitas sektor industri merupakan penggerak perekonomian pada satu negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan industri terbesar di Asia. Jika dibenahi dengan benar, sektor industri di Indonesia dapat memberi kontribusi yang lebih pada Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data dari Kementerian Bappenas, jika PDB Indonesia tahun 2015 tumbuh 6,10% maka sektor industri Indonesia diprediksi dapat tumbuh 6% dengan jumlah 27.408

industri se Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki bonus demografi yaitu jumlah penduduk usia produktif yang besar. Ini bisa menjadi modal berkembangnya industri di Indonesia khususnya manufaktur. (<http://indonesianindustry.com/enam-tantangan-pembangunan-industri-di-indonesia/>)

Indonesia dikenal oleh dunia internasional sebagai salah satu negara destinasi pariwisata. Dengan ragam pariwisata Indonesia mulai dari alam, budaya, hingga sejarah, pengembangan industri pariwisata dan industri kreatifnya diperlukan sebagai salah satu usaha ekonomi nasional mandiri karena pesona alam Indonesia tidak begitu saja langsung menarik minat pasar. Usaha dari industri kreatif pariwisata juga diperlukan. Salah satunya adalah ide dari salah satu industri kreatif yang secara periodik dan berkelanjutan dilaksanakan, yaitu “*Visit Indonesia Years*” atau Tahun Kunjungan Wisata. Selain untuk menaikkan minat pasar, program ini juga berfungsi untuk memperkuat komitmen dari semua aktor dan pemangku kepentingan dari industri pariwisata mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Idealnya, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan perekonomian, dan mendukung kelestarian dengan dampak negatif yang minimum.

Diungkapkan oleh Mc Lennon dalam Marpaung dan Bahar (2002:45-46) yaitu akan tercipta sebuah pariwisata yang layak jika pariwisata tersebut memenuhi prinsip-prinsip yang diantaranya pengembangan pariwisata harus memberdayakan penduduk setempat sebagai basis, Mc Lennon lebih lanjut

mengungkapkan pariwisata yang layak adalah pariwisata yang memenuhi beberapa prinsip, yaitu:

1. Secara aktif mendorong kelangsungan peningkatan di suatu daerah, kebudayaan, sejarah, dan alam.
2. Menekankan dan menampilkan identitas daerah sebagai sesuatu yang unik.
3. Dilakukan berdasarkan pada keterampilan interpretasi peninggalan yang ada.
4. Memberdayakan masyarakat lokal untuk menginterpretasikan warisan mereka kepada tamu.
5. Membangun rasa bangga masyarakat lokal akan warisan mereka dan meningkatkan hubungan dengan tamu serta keterampilan pelayanan.
6. Membantu memelihara gaya hidup dan nilai-nilai setempat.
7. Memberdayakan masyarakat lokal untuk merencanakan dan memfasilitasi pengalaman berdimensi ganda yang otentik dan bermakna kepada pengunjung.
8. Bersifat antar budaya, yaitu berarti tamu dan tuan rumah sama-sama menerima pengalaman yang saling memperkaya.
9. Mewakili program yang dapat ditetapkan di setiap tingkat pengembangan pariwisata dan semua kondisi pariwisata.
10. Menampilkan pendekatan bernilai tambah terhadap pariwisata yang berarti meningkatkan kedalaman dan level pelayanan yang diberi kepada wisatawan.
11. Menampilkan suatu pendekatan ke arah perkembangan pariwisata berkelanjutan. Karena menekankan dan menghormati peninggalan suatu daerah serta memberdayakan penduduknya sebagai basis pengembangan pariwisata sejati.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/jasa bagi pemenuhan barang atau jasa wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kawasan strategis pariwisata memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti aspek kehidupan sosial dan budaya, pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan sumberdaya

alam, dan lain-lain. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Salah satu kawasan tujuan pariwisata adalah Kota Batu. Kota Batu memiliki keunggulan udara yang sejuk, dan keindahan panorama dengan *background* pegunungan yang dapat dibuktikan dari letak geografisnya, yang mana Kota Batu dikelilingi oleh beberapa gunung wisata, seperti Gunung Panderman, Gunung Banyak, dan Gunung Welirang, dengan potensi obyek dan daya tarik yang bermacam-macam. Pengembangan pariwisata di Kota Batu awalnya mengarah pada pengembangan artifisial atau buatan, yang dikelola oleh investor swasta, seperti Selecta dan Jawa Timur Park. Tentu disadari jika pengembangan wisata alam buatan akan membutuhkan pembukaan lahan, dan semakin berjalannya waktu, akan semakin menipis lahan di Kota Batu jika banyak investor swasta yang datang untuk menawarkan pembelian lahan untuk dibuka wahana wisata alam buatan seperti dua wisata buatan diatas yang sudah sukses. Pemerintah Kota Batu tanggap dalam menyelesaikan permasalahan ini. Agar *City Branding: Shining Batu* tidak hilang dan Kota Wisata Batu tetap bertahan tanpa merusak lingkungan hidup, dikembangkanlah konsep agrowisata atau konsep desa wisata.

Kota Batu memiliki 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan/Desa, dan hanya 12 Desa yang dijadikan kompleks Desa Wisata yang tersebar di 3 Kecamatan di Kota Batu dengan bermacam-macam potensi yang ada pada masing-masing desa. Salah

satu contohnya yaitu di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji yang menawarkan adanya Kampung Wisata Kungkuk. Di kampung wisata ini tersedia bermacam-macam paket wisata, seperti berkuda, paket *outbound*, *homestay*, paket wisata edukasi, dan lain sebagainya. Jadi tidak heran jika Kota Batu dijuluki sebagai Kota Wisata, karena pada satu desa di Kota Batu memiliki lebih dari satu potensi wisata alam. Dalam kesempatan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, dengan produk andalan Desa Wisata Kungkuk (KWK).

Alasan dipilihnya lokasi penelitian di Desa Wisata Punten karena memiliki bermacam-macam potensi alam yang atraktif, sehingga dikenal dengan julukan Kampung Wisata Kungkuk (KWK). KWK dikelola oleh kelompok penggagas, yang dibentuk dengan latar belakang kampung wisata edukasi pertanian. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya 75% bermatapencarian sebagai petani (*Diskursus Kampung Wisata*). Dusun Kungkuk adalah daerah yang unik karena berada di atas bukit, bila terlihat dari jauh bentuknya nampak seperti piramida. Dusun Kungkuk berada diantara Gunung Panderman di sebelah selatan dan Gunung Arjuna di sebelah utara. Selain itu, terdapat potensi pariwisata yang ada dikemas menjadi paket pariwisata itu diantaranya pertama, potensi alam seperti petik buah (jeruk dan apel). Kedua, potensi budaya seperti karnaval bantengan, tari bambu gila, jaran kepong, dan tari santar. Ketiga, wahana tambahan seperti *homestay* dan *outbound*. Semua potensi pariwisata tersebut telah tersaji dalam beberapa paket pariwisata yang diciptakan pada awal pembentukan KWK oleh penggagas awal dengan pihak perhotelan, kemudian dalam prosesnya penggagas

KWK bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun fisik dan melakukan pelatihan untuk masyarakat. Kebijakan pemerintah adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dari implementasi suatu program. Hal tersebut diwujudkan di Kota Batu dengan pengembangan industri pariwisata di Kota Batu dengan basis agrowisata terletak pada pengembangan kompleks desa wisata. Disini peneliti mengambil tempat penelitian di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa masalah dalam pengembangan desa wisata di Kota Batu. Permasalahan tersebut diantaranya adalah pariwisata yang dikelola oleh desa kalah saing dengan pariwisata yang dikelola oleh pihak swasta dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu sumber permodalan dan media promosi. Selain itu, pengembangan desa wisata di Kampung Wisata Kungkuk sudah lama dicanangkan, namun realisasi pembangunan obyek wisata masih belum direalisasikan dengan maksimal. Masyarakat menganggap bahwa pihak Dinas Pariwisata Kota Batu tidak serius dalam merealisasikan pengembangan desa wisata. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan menelaah tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Batu dalam mengembangkan desa wisata yang terletak di Kota Batu itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Studi Pada Pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribusi penelitian ini adalah:

1. Aspek Akademis

Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik yang berkenaan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

2. Aspek Praktis

Menjadi masukan dan sumbangan pikiran bagi instansi terkait dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti menyusun sistematika pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

mengenai analisis kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu terkait pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam menganalisis dan menginterpretasikan data tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, dan analisis data. Metode analisis yang digunakan peneliti untuk karya ini adalah metode kualitatif.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang meliputi penjelasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Yang mana program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Batu dan terdapat partisipasi aktif masyarakat dalam implementasinya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini disajikan tentang kesimpulan yang garis besarnya merupakan merupakan temuan pokok, baik bersifat substansial maupun metode teknis serta dikemukakan analisis dari hasil pembahasan (hasil penelitian di lokasi penelitian) dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang bisa menjadi pertimbangan pihak yang terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Kata “Administrasi” yang dikenal di Indonesia berasal dari kata “*administration*” (*to administer*). Kata *to administer* dapat berarti *to manage* (mengelola) *to directing* (menggerakkan). Dari artian ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola dan menggerakkan. Kata “administrasi” juga dapat berasal dari bahasa Belanda *administratie* yang pengertiannya mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegevens* (tata usaha), *bestuur* (manajemen organisasi) dan *beheer* (manajemen sumberdaya). Dan dari asal kata ini administrasi mencakup kegiatan penatausahaan dan manajemen (Indradi, 2006:1)

Dari beberapa istilah ini administrasi dapat berarti sebagai kegiatan pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh si pemberi tugas, atau sebuah kegiatan yang dimaknai luas meliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaannya. Atau bisa juga berarti sebagai kegiatan yang terbatas pada ketatausahaan dan kegiatan catat mencatat. Dengan berkembangnya administrasi sebagai cabang ilmu tersendiri, pengertian administrasi juga ikut berkembang. Mulai dari yang memandang administrasi sebagai usaha, manajemen, proses, hingga pemerintahan.

Administrasi publik merupakan proses koordinasi yang dilakukan dari tahap formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Menurut Chander dan Plano yang dikutip oleh Pasolong (2010:7) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan publik diorganisir dan dikoordinasi untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengelola keputusan-keputusan pada kebijakan publik dalam berbagai tugas yang ditentukan. Dijelaskan oleh Chander dan Plano dalam Pasolong bahwa administrasi publik merupakan sebuah seni dan ilmu (*Art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *Public Affair* dan melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang digunakan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan yang khususnya di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Jadi, administrasi publik adalah sebuah ilmu dan karya seni untuk memecahkan berbagai permasalahan publik.

Administrasi publik adalah sebuah koordinasi dari tiga kelompok yang ada dalam lingkungan pemerintahan. Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (1970) yang dikutip Pasolong (2010:8), menjelaskan tentang administrasi publik merupakan sebuah kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi kelompok eksekutif, legislatif, dan hubungan diantara mereka yang mempunyai peranan penting untuk perumusan kebijakan pemerintah dan karena itu merupakan sebagian besar dari proses politik yang sangat erat kaitannya dengan kelompok swasta dan perorangan untuk menyajikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa mengalami perbedaan penempatan pengertian tentang

administrasi perseorangan. Oleh sebab itu, koordinasi memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan.

Administrasi publik adalah proses sebuah penggabungan antara teori dan praktik, dengan tujuan untuk lebih memiliki respon terhadap masyarakat. Menurut Nicholas Henry (1988) yang dikutip Pasolong (2010:8) mendefinisikan administrasi publik sebagai sebuah kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik untuk mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha untuk mengorganisasikan praktik manajemen sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi, administrasi publik sebagai pendorong agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

B. Kebijakan Publik

Menurut Eystone dalam Wahab (2014:13) tentang kebijakan publik yaitu *“the relationship of governmental unit to it’s environment”* (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Sejalan dengan pendapat yang pernah dikemukakan oleh Wilson dalam Wahab (2014:13) yang mana kebijakan publik berarti *“The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)”* (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan

pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)).

Proses kebijakan publik terdiri dari enam tahap. Proses kebijakan publik menurut Dye dalam Widodo (2013:16) meliputi beberapa tahapan:

1) Identifikasi Masalah Kebijakan (*Identification of Policy Problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah.

2) Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Agenda setting merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap suatu masalah publik.

3) Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)

Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, lembaga legislatif, dan presiden (eksekutif).

4) Pengesahan Kebijakan (*Legitimizing of Policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6) Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan lembaga pemerintah, konsultan diluar badan pemerintah, pers, dan masyarakat publik.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tugas yang diemban oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan adanya proses dalam kebijakan publik seperti identifikasi, *agenda setting*, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis lebih mengarah kepada teori implementasi kebijakan publik. Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori dari Edward III. Penulis berpandangan bahwa teori implementasi kebijakan publik dari Edward III adalah yang paling cocok untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 di Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

1. Implementasi Kebijakan Publik

Ketika sebuah kebijakan publik telah melalui perencanaan yang baik, maka harus dilanjutkan ke tahap implementasi dengan baik juga. Implementasi merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena kita ketahui bahwa sering timbul masalah yang tidak dapat diduga –duga pada tahap

implementasi. Implementasi kebijakan mempunyai pengertian sebagaimana diungkapkan oleh Van Meter dan Carl E. Va (1974) yang dikutip oleh Widodo (2013:86) menguraikan implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik itu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun individu/kelompok swasta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini akan berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional dan melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan dan harus sesuai dengan amanat dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Pada kamus Webster yang dikutip oleh Widodo (2013:86) implementasi diartikan sebagai penyedia saran untuk melakukan sesuatu, dan menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah sebuah pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dengan memberikan saran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Istilah lainnya adalah implementasi adalah kegiatan yang harus terjadi setelah sebuah program selesai direncanakan.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III

Implementasi kebijakan publik memiliki bermacam-macam model implementasi. Macam model implementasi kebijakan publik beberapa diantaranya adalah model Grindle, Mazmanian dan Sabatier, Van Horn dan Van Meter, dan Edward III. Menurut Edward III (1984) yang dikutip oleh Widodo (2013:96) memiliki empat variabel yang penting dan mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan implementasi kebijakan publik. Empat faktor tersebut diantaranya adalah *communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure*.

1.) Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah sebuah proses pemberian informasi dari komunikator (pembicara) kepada komunikan (calon penerima informasi). Sedangkan komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*). Menurut Widodo (2013:97), informasi kebijakan publik harus disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan supaya para aktor kebijakan dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Serta agar para aktor kebijakan dapat mempersiapkan secara pasti dan akurat segala hal yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat diraih. Adapun berbagai macam dimensi pada komunikasi kebijakan, yaitu dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki kebijakan publik dapat disampaikan kepada aktor dan sasaran (kelompok/individu) kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan juga konsistensi.

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisi kepada para aktor, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait

dengan kebijakan dapat ditransformasikan dengan baik dan jelas (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang harus memiliki unsur kejelasan, sehingga diantara mereka mengetahui dan paham maksud, tujuan, dan sasaran dan substansi dari kebijakan publik. Dengan kata lain, agar kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien.

2.) Faktor Sumber Daya (*Resources*)

Edward III yang dikutip oleh Widodo (2013:98) mengungkapkan bahwa faktor sumber daya ini mempunyai peran yang vital dalam implementasi kebijakan publik. Lebih lanjutnya menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para aktor kebijakan publik kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya dan tidak konsisten, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Sumber daya dapat tergolong diantaranya sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (infrastruktur) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia menurut Edward III dalam Widodo (2013:98) menegaskan bahwa "*Probably the most resources in implementing policy is staff*". Jumlah sumber daya manusia harus mencukupi jumlah dan memiliki kecakapan khusus sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing sesuai dengan asas efisiensi. Jadi, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia atau aparatur yang bertanggungjawan melaksanakan kebijakan. Walaupun peraturan pada pelaksanaan kebijakan jelas dan telah

ditransformasikan secara tepat, namun jika dilihat segi kualitas dan kuantitas yang minim, maka pelaksanaan kebijakan publik tidak dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan kuantitas yang besar saja, tetapi juga harus memenuhi dari segi kualitas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi tanggungjawabnya. Sumber daya manusia tersebut harus mengetahui hal yang harus dilakukan sebagai aktor kebijakan. Sumber daya manusia tersebut membutuhkan informasi seperti bagaimana cara melaksanakan kebijakannya, mengetahui arti penting data tentang kepatuhan pihak yang terlibat peraturan dan pengaturan yang berlaku.

Sumber daya manusia sebagai aktor kebijakan juga harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Disamping itu, aktor kebijakan juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Tidak tercukupinya sumber daya berarti peraturan tidak dapat ditegakkan, pelayanan tidak dapat disediakan, dan peraturan yang digunakan tidak dapat dikembangkan. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan selain harus tercukupi juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, dan perintah dari atasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus layak dan sesuai standar cakap dan jumlah staf yang dibutuhkan sesuai dengan tugas yang diemban.

b. Sumber Daya Anggaran/Keuangan

Sumber daya anggaran yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan selain sumber daya manusia adalah sumber daya anggaran atau keuangan yang diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan.

terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan publik juga tidak maksimal. Pasalnya untuk memfasilitasi kebutuhan publik seperti pengadaan barang juga membutuhkan anggaran yang cukup. Hal ini ditegaskan oleh Edward III dalam Widodo (2013:100) dalam kesimpulan studinya yakni *“Budgetary limitations, and citizens opposition limit the quality of the services that implementator can be provide to the public”*. Kondisi tersebut juga menyebabkan para aktor kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan sebuah program. Terbatasnya insentif tersebut tidak mampu mengubah sikap dan perilaku aktor. Oleh sebab itu, agar para aktor kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) yang baik dalam melaksanakan kebijakan maka diperlukan adanya insentif yang cukup. Dalam hal ini, Edward III menerangkan dalam Widodo (2013:100) bahwa *“changing personnel in government bureaucracies is difficult and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with the problem of implementators disposition is to alter the disposition of existing implementators through the manipulation of incentives by high-level policy makers may influence their action”*.

Besar kecilnya insentif dapat mempengaruhi disposisi pelaku kebijakan. Insentif bisa diberikan dalam dua macam, yaitu penghargaan dan hukuman. Meskipun ketika pelaksanaannya diakui sulit seperti yang ditegaskan oleh Edward III yang dikutip oleh Widodo (2013:101) bahwa *“rewards are the other side of the incentive coin, but they are even more difficult for executives to administer*

than penalties. In all levels of the executive and judicial branch of government, individual performance is difficult to reward with pay increases". Bahkan insentif tersebut dapat mengarah pada terjadinya "goal displacement" para aktor kebijakan, sebagaimana digambarkan oleh Edward III dalam Widodo (2013:101) tentang "incentives can be the goal displacement bureaucrats who are provided incentive to implement policies may begin to pursue goals other than those intended by their superior. Vague and diverse goal, poor measure of performance, and obscure implementation directives make it difficult to evaluate the success of many policies. When a criterion of success is developed for a policy, bureaucrats may attempt to beat the system by emphasizing most whatever is being measured by their superiors, independent of whether or not their action advance the policy goal".

Pada kondisi seperti yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya anggaran/keuangan akan mengganggu keberhasilan dari sebuah kebijakan. Selain program menjadi tidak optimal dijalankan, keterbatasan anggaran juga akan mempengaruhi disposisi para aktor kebijakan menurun, yang nantinya akan menjadi rawan oleh *goal displacement*. Oleh sebab itu, untuk memacu semangat dan meningkatkan disposisi para aktor kebijakan publik dalam menjalankan tugasnya, maka diperlukan sistem insentif yang akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus menyertakan atau menyediakan sistem insentif untuk para aktor kebijakan, mulai dari petugas pelayanan, manajer, bahkan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

c. Sumber Daya Peralatan (*Facility*)

Sumber daya peralatan atau fasilitas adalah sarana yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, listrik, dan semua sarana terkait yang mendukung dalam pemberian pelayanan dan implementasi kebijakan sesuai dengan Edward III yang dikutip oleh Widodo (2013:102). Lebih lanjut, Edward III menegaskan “*physical facilities may also be critical resources in implementation won't be succeed*”. Dengan demikian, keterbatasan fasilitas dan peralatan juga dapat mempengaruhi, bisa kemunduran atau bahkan kegagalan pelaksanaan sebuah implementasi kebijakan publik. Peralannya, dengan keterbatasan fasilitas seperti informasi, menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan sistem yang akuntabilitas. Keterbatasan fasilitas yang tersedia kurang menunjang efisiensi dan mengurangi motivasi aktor kebijakan dalam melaksanakan tugasnya.

d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Selain itu, informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para aktor kebijakan publik tidak melakukan sebuah kesalahan dalam menginterpretasi tentang pelaksanaan kebijakan. Informasi ini penting untuk menyadarkan mereka agar mampu dan mau melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab dan sadar diri. Kewenangan

juga merupakan sumber daya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan khususnya sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan keputusan dan meyakinkan masyarakat bahwa sebuah kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan bersama.

Edward III dalam Widodo (2013:103) menjelaskan bahwa kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan memengaruhi lembaga tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi hal yang penting kehadirannya ketika dihadapkan dengan sebuah masalah dan mengharuskan untuk segera memberikan solusi dan keputusan yang tepat dan cepat. Jika lembaga tidak diberikan kewenangan untuk membuat keputusan sendiri, di mata masyarakat akan dipandang kurang meyakinkan karena tidak memiliki wibawa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Pembuat kebijakan dari sebuah lembaga harus diberikan kewenangan sendiri untuk mengerjakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan bidangnya. Karena, sumber daya kewenangan sebagaimana dijelaskan diatas adalah harus mengandung ketentuan-ketentuan dan aturan yang mengikat anggota (contohnya sebagai *punishment and reward*).

3.) Faktor Disposisi (*Disposition*)

Menurut Edward III yang dikutip Widodo (2013:104), disposisi yaitu kemampuan serta kemauan yang kuat dari lembaga pelaksana program untuk melaksanakan program tersebut. Faktor penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan tidak hanya seberapa jauh pengetahuan aktor kebijakan tentang deskripsi tugasnya, tapi juga ditentukan kemauan para pelaku kebijakan

tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka dapat mendalami dan memahaminya. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap kebijakan. sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan.

Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo (2013:104), disposisi berarti sebuah kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

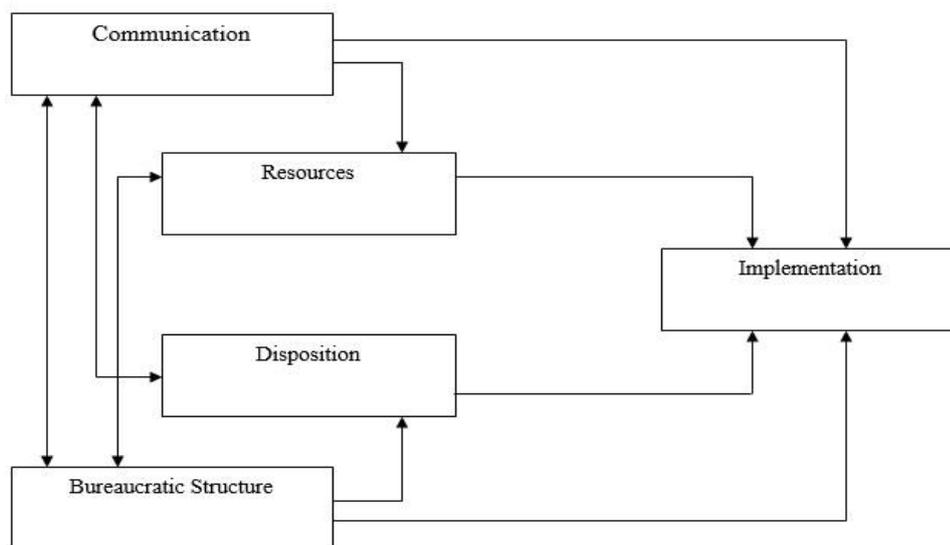
4.) Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Edward III yang dikutip oleh Widodo (2013:106) menyebutkan tentang implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisiennya struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup banyak aspek, diantaranya adalah struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut, dan hubungan organisasi tersebut dengan pihak luar organisasi dan sebagainya. Struktur organisasi merupakan fragmentasi dan termasuk standar operasional prosedur

yang akan memudahkan dan menyamakan tindakan dari para aktor kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya proses komunikasi, dimana para aktor kebijakan memiliki peluang yang besar untuk mengalami distorsi informasi dan instruksi. Fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan para pejabat pemegang peran strata atas untuk mengkoordinasi semua sumber daya yang relevan dalam sebuah yuridiksi, akibatnya terjadi pemborosan sumber daya. Dengan kata lain, organisasi pelaksana yang terfragmentasi atau terpecah belah akan mengalami distorsi pelaksanaan kebijakan. Semakin terpecah belah sebuah organisasi, maka semakin kacau koordinasi tim di dalamnya. Hal ini lah yang sering menyebabkan kegagalan sebuah implementasi kebijakan.

Keberhasilan implementasi memerlukan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait. Jika masih ada fragmentasi organisasi, tentu ini akan sangat mengganggu kerjasama dan koordinasi, yang sangat diperlukan untuk kesuksesan perjalanan sebuah implementasi kebijakan publik. Permasalahan lainnya adalah ketidakjelasan standar operasional prosedur (SOP), baik SOP mekanisme, sistem dan prosedur penanganan, dan tanggungjawab antar pelaku, serta keharmonisan yang minim antar pelaksana kebijakan yang satu dengan yang lainnya.

Faktor tujuan dan sasaran, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah disebutkan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan gagalnya implementasi sebuah kebijakan publik. Secara skematis, model proses implementasi kebijakan publik dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Dampak Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi

Sumber: George E. Edward III yang dikutip oleh Widodo (2013:107)

Pada Gambar 1 diatas menurut George E. Edward III dalam Widodo (2013:107) menggambarkan tentang pola komunikasi modern adalah sebuah transformasi dari kebijakan yang bukan hanya untuk aktor kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran, unit, dan lembaga sosial yang terkonsentrasi ke permasalahan kebijakan publik. Melalui proses komunikasi ini para pelaku kebijakan yang teridentifikasi dalam struktur sosial birokrasi menjadi jelas apa yang menjadi substansi kebijakan, apa yang menjadi sasaran dan tujuan, dan arah berjalannya kebijakan. Dengan dipahaminya substansi kebijakan akan lebih

mudah dalam penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai salah satu dimensi dari struktur birokrasi. Kejelasan substansi kebijakan dan SOP menjadikan pelaksanaan kebijakan dan disposisi aktor lebih teratur dan baik.

Melalui komunikasi pula, sumber daya (*Resources*) akan semakin mudah untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dengan bijak. Segala macam sumber daya seperti sumber daya manusia, keuangan/anggaran, fasilitas, dan informasi dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Efektivitas dan intensitas komunikasi kebijakan membutuhkan figur seorang pemimpin organisasi publik yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang profesional dalam menjalankan tugasnya selama proses pelaksanaan kebijakan berlangsung.

Struktur birokrasi adalah variabel selanjutnya yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mencakup aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan intra dan ekstra organisasi. Oleh sebab itu, dimensi struktur birokrasi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu dimensi fragmentasi dan dimensi SOP. Struktur birokrasi memengaruhi tingkat intensitas dan efektivitas komunikasi kebijakan. Semakin terfragmentasi struktur birokrasi, maka semakin butuh koordinasi yang semakin intens dan dalam hal ini berpeluang terjadinya distorsi komunikasi. Pengaturan SOP juga harus jelas. Dengan semakin jelasnya SOP, semakin mudah pula menentukan kebutuhan, baik kualitas maupun kuantitas yang diperlukan. Dengan demikian, prinsip efektivitas dan efisiensi menjadi hal yang diutamakan. Ketepatan dalam melaksanakan tugas

juga menjadi lebih simpel dan peluang keberhasilan sebuah kebijakan akan meningkat.

Struktur birokrasi juga berpengaruh pada tingkat disposisi. Struktur birokrasi yang terfragmentasi akan menjadi rawan konflik. Akibatnya terjadi ketidakharmonisan didalamnya. Implikasinya, peluang kegagalan pelaksanaan kebijakan akan semakin terbuka. Ada keterkaitan yang erat antara struktur birokrasi dengan SOP. SOP dibuat sedemikian jelas agar pembagian tugas, tujuan, dan sasaran dapat tercapai. Kejelasan ini memudahkan seseorang untuk menetapkan kebijaksanaan untuk organisasinya dan meningkatkan disposisi mandiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi memengaruhi tingkat keberhasilan sebuah kebijakan. Jika menginginkan keberhasilan kebijakan publik, perlu adanya pemenuhan empat variabel diatas dengan sikap yang konsisten, tanggungjawab, dan akuntabilitas penuh.

C. Konsep Governance

1. Definisi Governance

Terdapat banyak pengertian yang disampaikan oleh para ahli tentang teori *governance*, karena secara umum di negara-negara maju telah menerapkannya dalam berbagai bidang pemerintahan. Seperti halnya Pinto yang mendefinisikan *Governance* sebagai praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi secara khusus (Pinto dalam Nisjar, 1997:119)

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Ganie dan UNDP sebagai berikut:

“*Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. (Ganie dalam Widodo, 2001:142)

Selanjutnya pengertian *governance* memiliki 3 (tiga) kaki, yaitu:

- 1) *Economic Governance*, mencakup proses pembuatan keputusan-keputusan yang mempengaruhi langsung ataupun secara tidak langsung aktivitas ekonomi negara atau berhubungan dengan ekonomi lainnya.
- 2) *Political Governance*, merujuk pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang autoritatif.
- 3) *Administrative Governance*, merupakan suatu sistem implementasi kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien, tidak memihak, akuntabel dan terbuka. (LAN, 2000:6)

Good Governance adalah solusi untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh OPA yang belum dapat diatasi. Namun, konsep *Good Governance* menerima beberapa saran dan kritik. Sebagian karena tidak semua prinsip *good governance* dapat dijalankan di negara berkembang. Lainnya, prinsip *good governance* bersifat imperialis karena dipaksakan oleh lembaga-lembaga internasional untuk diterapkan di negara berkembang. Dalam satu kondisi, negara maju dipandang menguntungkan karena dengan adanya pasar bebas/*free market* di negara-negara berkembang karena mulai diterapkannya prinsip *good governance*.

Prinsip *good governance*, sesuai dengan definisinya menurut UNDP dalam Farazmand (2004:9) berasal dari dua faktor. Faktor pertama adalah interaksi tiga

pilar *good governance*, yaitu interaksi sektor pemerintah, sektor privat, dan masyarakat madani. Interaksi ketiga pilar tersebut mengabaikan kekuatan terpenting yang mempengaruhi *governance* di negara berkembang dan kurang maju, yaitu kekuatan internasional atau global, kekuasaan negara *elite corporate* trans dunia. Struktur kekuatan internasional hampir satu abad lamanya mendominasi politik, ekonomi, dan militer, secara terbuka mengintervensi urusan dalam negeri semua negara penentang. Secara keseluruhan, struktur kekuatan global membentuk lingkaran internal dan eksternal *governance* di setiap negara. Oleh sebab itu, hubungan ketiga pilar tersebut sebenarnya tidak menjelaskan sama sekali sistem *governance*. Interaksi ketiganya harus dilengkapi dengan struktur kekuatan internasional yang mendominasi ketiganya. Dalam kondisi ini, Farazmand (2004) menawarkan konsep baru untuk administrasi publik, yaitu *sound governance*.

Farazmand (2004:12) menjelaskan didalam bukunya bahwa konsep *sound governance* yang digunakan adalah untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik dan tanpa caat secara sosial, politik, ekonomi atau finansial, manajerial, etika, dst, tetapi juga jelas secara global dalam interaksinya dengan bangsa lain dan pemerintahannya dalam cara independen dan mandiri. *Sound governance* merefleksikan fungsi *governing* dan administratif dengan kinerja organisasi dan manajerial yang jelas dan bukan hanya kompeten dalam perawatan, namun juga antisipatif, responsif akuntabel, korektif, dan transparan yang berorientasi strategis dan jangka panjang meski operasinya dalam jangka pendek.

2. Karakteristik *Good Governance*

Karakteristik atau unsur-unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menurut Bhata dalam Nisjar (1997:119) dalam Widodo (2001:1) adalah Akuntabilitas, Transportasi, Keterbukaan, dan *Rule of Law*. Menurut UNDP (1997:13) memaparkan ada sembilan karakteristik dari *good governance*, yaitu:

- 1) *Participation of Law/Partisipasi*. Masyarakat atau sebagai *stakeholder* harus memiliki suara atas pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik melalui lembaga yang sah dibangun atas kebebasan asosiasi, serta kapasitas partisipasi yang luas konstruktif.
- 2) *Rule of Law/Aturan Hukum*. Kerangka hukum yang berkeadilan dalam menyelenggarakan undang-undang yang netral/tidak memihak, hukum tertentu diatas hak asasi.
- 3) *Transparency/Keterbukaan*. Keterbukaan dibangun dari informasi yang luas. Dalam prosesnya, informasi dan institusi diakses langsung untuk urusan terkait, dan informasi yang cukup disediakan untuk memahami dan memonitor.
- 4) *Responsiveness/Kepekaan*. Institusi mencoba untuk memenuhi dan melayani semua *stakeholder*.
- 5) *Consensus of Orientation/Musyawaharah Mufakat*. Tata kelola pemerintahan yang baik menengahi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus yang luas diatas kepentingan terbaik dari kelompok yang kemungkinan pada kebijakan atau prosedur.

- 6) *Equity/Keadilan*. Masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- 7) *Effective and Efficiency/Efektif dan Efisiensi*. Institusi memberikan pemenuhan kebutuhan dengan menggunakan sumber daya yang paling bijak.
- 8) *Accountability/Akuntabilitas*. Pembuat kebijakan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat bertanggungjawab pada publik dan *stakeholder* kelembagaan. Akuntabilitas berbeda-beda tergantung pada organisasi dan keputusan yang digunakan (internal atau eksternal) untuk organisasi tersebut.
- 9) *Strategic Vision/Visi Strategi*. Pemimpin dan publik memiliki perspektif yang luas pada tata kelola pemerintah yang baik dan pengembangan manusia serta apa saja yang kebutuhannya, tergantung kompleksitas perspektif.

3. Unsur-unsur *Good Governance*

Menurut Billah dalam Sirajuddin dkk (2009:133), *good governance* adalah sebuah tindakan atau tingkah laku yang mendasarkan pada nilai-nilai dan bersifat mengarah, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tindakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Hardjasoemantri (2003:3) menjabarkan tentang peran lembaga-lembaga dalam mewujudkan *Good Governance* terdiri dari:

- 1) Negara
 - a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil

- b. Membuat peraturan yang efektif dan adil
 - c. Menyediakan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel
 - d. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
 - e. Menegakkan hak asasi manusia
 - f. Melindungi lingkungan hidup
- 2) Privat/Swasta
- a. Menjalankan industri
 - b. Menaati peraturan
 - c. Meningkatkan standar hidup masyarakat
 - d. Menciptakan lapangan pekerjaan
 - e. Menyediakan insentif bagi pekerja
 - f. Memelihara lingkungan hidup
 - g. Memberikan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
 - h. Menyediakan kredit untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)
- 3) Masyarakat Madani
- a. Menjaga agar hak masyarakat terpenuhi
 - b. Mempengaruhi kebijakan
 - c. Mengembangkan sumber daya manusia
 - d. Sebagai sarana *check and balance* pemerintah
 - e. Mengawasi penyalahgunaan wewenang pemerintah
 - f. Sarana komunikasi antar masyarakat

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (2003:47), ada 3 (tiga) pilar yang perlu diperhatikan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain:

- 1) Pendidikan yang merupakan pembudayaan yaitu dengan menumbuhkembangkan tata nilai budaya, tata nilai masyarakat bangsa yang kondusif untuk masyarakat yang madani dan juga untuk *good governance*. Misalnya seperti mendorong untuk maju, mandiri, memiliki etos kerja yang tinggi, daya saing, sejahtera, dan berkeadilan;
- 2) Sistem dan mekanisme demokrasi merupakan pemberdayaan politik pada warga. Dimana semua warga negara memiliki hak-hak politik yang sama dan juga kedaulatan rakyat bukan kedaulatan negara atau penguasa;
- 3) Sistem dan mekanisme pasar yang berkeadilan merupakan pemberdayaan ekonomi warga atau rakyat. Lawan dari penunjukkan, monopoli, KKN, dan lain-lainnya yang ditentukan oleh penguasa. Kalaupun ada upaya membuat yang lemah mempunyai *a level playing*

field harus juga melalui *margin of preference* berdasar mekanisme pasar (*market friendly*)

4. Teori Transformatif *Good Governance*

Good governance mulai muncul setelah berubahnya sistem pemerintahan di Indonesia menjadi desentralisasi dan merupakan salah satu konsep untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dahulu hanya difokuskan kepada penerima manfaat sekarang telah berubah ke bentuk pelibatan warga yang lebih luas sehingga diharapkan menjadi salah satu cara baru untuk melibatkan sebanyak mungkin kelompok masyarakat dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi mengatasi hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan adanya konsep *good governance* diharapkan mampu mengubah tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih demokratis seperti yang diungkapkan oleh Fung dan Wright dalam SJ Sumarto (2004:21) bahwa *good governance* mampu membentuk demokrasi yang konvensional pada tataran tujuan yang sangat praktis yaitu meningkatkan sikap tanggap dan efektivitas pemerintahan sekaligus pada saat yang sama partisipasi warga akan membuat keadaan menjadi lebih adil, partisipatoris, dan akuntabel.

5. Karakteristik *Sound Governance*

Menurut Farazmand (2004:10), konsepsi *sound governance* adalah sebuah alternatif dari *good governance* karena beberapa alasan. Pertama karena lebih komprehensif dari konsep lain yang telah ditinjau sebelumnya dan berisi elemen-elemen dari *sound governance* global yang penting. Kedua, *governance* atau

pemerintah dapat dikatakan jelas (*sound*) walaupun sistem berkonflik dengan kepentingan imperialis. Ketiga, konsepsi *sound governance* memiliki karakter kualitas *governance* yang lebih unggul daripada *good governance*, serta dianggap lebih terbaharui dalam segi teknis, organisasional, profesional, organisasional, politik, dan ekonomi. Keempat, *sound governance* cocok dengan nilai-nilai konstitusi dan responsif kepada norma dan aturan rezim internasional. Dan yang kelima yaitu konsepsi *sound governance* berawal dari kerajaan dunia pertama Persia yang mempunyai sistem administrasi yang efisien dan efektif.

6. Level Sound Governance

Governance menurut Farazmand (2004) berisi level lokal, nasional, regional, dan internasional. Di era globalisasi, semua level *governance* dapat berhubungan langsung maupun tidak langsung. Beberapa persoalan *governance* dapat dipengaruhi, disangsikan, atau diinspirasi secara global, kalangan lain memberikan efek *trend setter* bagi negara dan pemerintahannya. Contohnya, permasalahan seperti kemiskinan, imigrasi, dan kesehatan yang menjadi pertimbangan global dan mampu memberi dampak bagi *governance* lokal dan nasional.

Persoalan *governance* lokal dan nasional masih dipengaruhi oleh norma, standar, dan internasional rezim yang mempengaruhi regulasi pemerintah lokal dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan administratif. Farazmand menjelaskan bahwa dalam model *sound governance* dapat membuahkan partisipasi aktif dari masyarakat, yaitu melalui keterlibatan langsung

maupun tidak langsung. Contohnya, dalam pengadaan jasa bersama, produksi bersama transportasi, perumahan, usaha pangan, dan lain-lain.

Menurut pandangan Domai (2011:24), penjelasan Farazmand diatas merujuk pada sebuah pemikiran kerjasama antara pemerintah lokal, atau kerjasama dengan masyarakat dalam bidang tertentu. Contohnya pengadaan layanan kota, polusi air, darat, dan udara, kemiskinan dan masalah kejahatan. Kerjasama antar daerah pada semua jenjang adalah kebijakan yang penting karena alasan sebagai berikut:

- a.) Pelaksanaan urusan-urusan yang bersifat lintas daerah yang terkait dengan pelayanan masyarakat dapat efektif dan efisien, jika dilaksanakan bersama dan bersinergi antar daerah
- b.) Solusi optimal dalam masalah lalu lintas dan transportasi, penyediaan air bersih, penanggulangan sampah, sebagai masalah bersama akan dapat dicapai melalui kerjasama daerah

7. Konsep Sinergi

Dengan adanya interaksi antar *stakeholders*, berarti ada kesempatan yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Selain terdapat interaksi, diperlukan pula adanya sinergi antar ketiga pemangku kepentingan. Sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Sedangkan menurut Covey dalam Najiyanti dan Rahmat (2011) mengartikan “Sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar”. Jadi, sinergi dapat dipahami

sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang lebih baik. Menurut Doctoroff dalam Lubis (2016), persyaratan utama bagi suatu sistem yang sinergi dan ideal adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, dan kreativitas. Dalam makna lain, sinergi adalah sebuah sumber kekuatan organisasi yang ampuh, bahkan sering digunakan untuk memperlihatkan perbedaan antara sukses dan kegagalan. Sinergitas dapat dibangun dengan memperkuat dua unsur, yaitu:

a. Komunikasi

Sofyandi dan Garniwa (2007), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- 1) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
- 2) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

Definisi komunikasi yang dikemukakan Sofyandi dan Garniwa bahwasannya komunikasi merupakan kegiatan pemindahan stimuli dari sumber kepada penerima guna mendapat rangsangan dari penerima sehingga akan terjadi pertukaran informasi antara sumber dengan penerima dan memunculkan timbal balik yang sesuai.

Menurut Myers & Myers dalam Hasan (2005:18) tentang komunikasi adalah sebagai titik pusat kekuatan yang menyatukan, sehingga terjadi koordinasi

antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir. Komunikasi yang terjadi memiliki fungsi sebagaimana Hasan (2005:22) mengemukakan, “Komunikasi memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia, sehingga fungsi komunikasi adalah mencapai pengertian satu sama lain, membina kepercayaan, mengkoordinasi tindakan, merencanakan strategi, melakukan pembagian pekerjaan, melakukan aktivitas kelompok dan berbagi rasa”.

b. Koordinasi

Selain komunikasi, dalam menciptakan sinergitas juga diperlukan adanya koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada koordinasi, sebagaimana dinyatakan oleh Myers & Myers dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (Hasan 2005:18). Menurut Pearce dan Robinson dalam Silalahi (2011:217), “Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit dalam satu usaha bersama, yaitu bekerja ke arah tujuan bersama”. Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994:39) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

1.) Hubungan Langsung

Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi dan langsung.

2.) Kesempatan Awal

Koordinasi yang baik dapat dicapai dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijakan.

3.) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.

4.)Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.

5.)Tujuan yang Jelas

Tujuan yang jelas penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif

6.)Organisasi yang Sederhana

Struktur organisasi sederhana memudahkan koordinasi agar efektif.

7.)Perumusan Wewenang dan Tanggungjawab yang Jelas

Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

8.)Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu syarat membuat sebuah koordinasi menjadi baik juga.

9.)Kepemimpinan Supervisi yang Efektif

Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

8. Konsep Kemitraan

Kata kemitraan jika dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berakar dari kata *partner*. *Partner* dapat diartikan “pasangan, jodoh, atau sekutu”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk sebuah ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan bersama dan adanya rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kapasitas di bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistyani, 2004:129).

Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak atau lebih;
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan;
- c. Ada kesepakatan;
- d. Saling membutuhkan (Sulistyani, 2004:130)

Hafsah (2000:62) mengatakan pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*Win-win Solution Partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi yang tawar yang setara berdasarkan dengan peran masing-masing. Dikatakan oleh Hafsah (2000:63) pula dalam kondisi ideal tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret adalah:

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat

- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah, dan nasional
- 5) Memperluas kesempatan kerja
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Demi mencapai tujuan dari sebuah kemitraan, dibutuhkan adanya beberapa usaha yang harus dijalankan. Ada beberapa langkah-langkah untuk menjalankan kemitraan menurut Kamil (hal 11-12) sebagai berikut:

a) Identifikasi Intern Lembaga

Pada tahap ini, lembaga mengidentifikasi komponen-komponen yang belum dimiliki untuk menyelenggarakan sebuah program yang akan menjadi kebutuhan, langkah awal yang harus dilakukan lembaga adalah menilai komponen apa saja yang harus ada pada untuk penyelenggaraan program tersebut. Contohnya dalam penyelenggaraan program pelatihan peningkatan kualitas produksi, yang harus disiapkan diantaranya: gedung, perlengkapan penunjang, bahan ajar, peralatan dan peraga, tenaga pelatih, peserta, dan dana.

b) Merumuskan aspek yang perlu dimitrakan

Dari hasil kegiatan identifikasi, langkah selanjutnya menyusun prioritas kebutuhan berdasarkan data hasil identifikasi, sehingga dari hasil kegiatan ini akan diketahui komponen-komponen yang akan dimitrakan terlebih dahulu sesuai dengan urgensi dan juga menyusun kriteria-

kriteria hasil identifikasi lembaga yang dibuat aspek-aspek yang dibutuhkan sebagai penyelenggaraan program, kebutuhan tersebut akan menjadi aspek yang akan dimitirakan dengan lembaga lain dan juga menentukan kriteria calon mitra.

- c) Mencari lembaga calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan oleh penyelenggara.
- d) Membuat kesepakatan dengan lembaga calon mitra.
- e) Setelah ada calon yang ditentukan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan, langkahs elanjutnya membuat kesepakatan-kesepakatan berkenaan dengan hak dan kewajiban mitra kerja, keputusan tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama, yang nantinya akan dijadikan pegangan/pedoman kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan jaringan kemitraan.

Kemitraan memiliki beberapa macam model. Menurut Sulistyani (2004:130) kemitraan dibagi menjadi 3 (tiga) model, yaitu diantaranya:

I. *Pseudo Partnership*, atau kemitraan semu.

Kemitraan semu adalah sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan dan disepakati. Ada sesuatu yang unik dalam kemitraan macam ini, bahwa kedua

belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan.

II. *Mutualism Partnership*, atau kemitraan mutualistik.

Kemitraan mutualistik adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, dan melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan yang lainnya.

III. *Conjugation Partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan konjugasi memberikan pemahaman bahwa organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perseorangan yang memiliki kelemahan didalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

D. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang berarti keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Sedangkan menurut Wahab (2003:5), pariwisata adalah salah satu industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan mengaktifkan sektor produksi yang lain di dalam sebuah negara penerima wisatawan. Lagipula, pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks, meliputi industri-industri dalam arti yang klasik seperti industri kerajinan tangan, penginapan, travel dan transportasi.

Menurut Suwanto (2004:3) bahwa pariwisata pada hakikatnya adalah sebuah proses kegiatan sementara dari seseorang atau lebih dari satu orang menuju ke tempat diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, ataupun hanya sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Sedangkan menurut Yoeti (2008:8), pariwisata memenuhi empat (4) kriteria dibawah ini:

- a. Perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lain. Perjalanan dilakukan diluar tempat kediaman dimana orang itu biasa tinggal.
- b. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih, kecuali bagi *excursionist* (kurang dari 24 jam).
- c. Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, atau kota yang dikunjungi.
- d. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asal, dimana ia biasa tinggal, bukan diperoleh selama ia berwisata di tempat baru tersebut.

2. Jenis-jenis Pariwisata

Pariwisata dapat digolongkan menjadi beberapa macam jenisnya. Jenis-jenis ini digolongkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan seseorang untuk melakukan wisata. Tujuan, kebutuhan, dan kondisi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi jenis wisata apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Menurut Spillane (1989:29) yang menjelaskan jenis-jenis pariwisata adalah sebagai berikut:

1) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Pariwisata jenis ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar, menikmati keindahan alam, mendapatkan ketenangan, dan kedamaian diluar kota.

2) Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki hari liburanya untuk istirahat, atau memulihkan kesegaran. Biasanya mereka tinggal selama mungkin ditempat yang mereka anggap benar-benar menjamin tujuan rekreasi mereka dapat terpenuhi. Misal pantai atau pegunungan.

3) Pariwisata kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Ditandai dengan rangkaian motivasi, seperti keinginan belajar di pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan cara hidup, peninggalan masa lampau/sejarah, dan lain sebagainya.

4) Pariwisata olah raga (*Sport Tourism*)

Jenis pariwisata ini dibagi menjadi dua (2), yaitu:

- a) *Big Sport Even*: Peristiwa olahraga akbar yang menarik minat banyak orang
- b) *Sporting tourism of practitioner*: Pariwisata yang bagi mereka (wisatawan) yang menginginkan praktek sendiri

5) Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*)

Berupa penyediaan tempat pertemuan dan konvensi dengan fasilitas yang baik dan bagus yang diperlukan untuk menunjang efektivitas konvensi. Jenis wisata ini masih berusaha dikembangkan di Indonesia.

6) Pariwisata untuk perdagangan (*Business Tourism*)

Dilakukan untuk transaksi ataupun pertemuan para pengusaha untuk keperluan bisnis.

Jenis-jenis pariwisata ini merupakan bentuk bukti bahwa terdapat bermacam-macam tipe dan motif. Jenis pariwisata yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan tujuan wisatawan. Kebutuhan wisatawan merupakan motif utama yang mendasari seseorang untuk memutuskan tujuan wisata dan atas dasar apa mereka melakukan hal tersebut.

3. Peranan Pariwisata dalam Pembangunan

Pemerintah berkeinginan mengembangkan pariwisata dengan tujuan untuk mempercepat proses peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Yoeti (2008:28) adalah sebagai berikut:

a. Transportation

Yaitu yang melayani angkutan wisatawan dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya, atau dari satu kota ke kota yang lain yang menjadi tujuan wisatawan, salah satunya yaitu bus pariwisata.

b. Accomodation

Yaitu yang melayani wisatawan untuk kebutuhan akomodasi bagi wisatawan seperti hotel, motel, villa, apartemen.

c. Restaurant

Yaitu yang melayani wisatawan untuk kebutuhan makan dan minum selama kunjungan wisata.

d. Shopping Center

Termasuk dalam kelompok toko atau supermarket yang menjadikan kebutuhan pembelanjaan wisatawan, seperti toko cinderamata, toko barang kesenian, dan toko lukisan.

Menurut Wahab (2003:77) tentang wisatawan yang tiba di suatu negara, baik secara individu maupun kelompok, tentu akan membelanjakan uangnya selama berada disana seperti membayar jasa-jasa yang ditawarkan atau berupa barang. Seluruh uang yang dibelanjakan ini adalah jumlah penerimaan dari sektor industri pariwisata dan menjadi pola konsumsi di suatu negara. Semakin bertambah konsumsi wisatawan, semakin banyak pola konsumsi di negara tersebut.

4. Perencanaan dan Pengelolaan Industri Pariwisata

Perencanaan untuk semua kegiatan adalah hal yang penting untuk dilakukan agar sebuah tujuan yang telah ditetapkan dapat diraih dengan lebih mudah. Dalam hal perencanaan pariwisata, menurut Hadiwijoyo (2012:57) adalah kecenderungan pertumbuhan penduduk, persediaan lahan cadangan, pertumbuhan fasilitas, dan kemajuan teknologi dan penerapannya harus dimasukkan dalam perencanaan. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang tepat untuk membangun konsep industri pariwisata yang secara menyeluruh sampai dengan manajemen yang baik dan harus direalisasikan untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan pariwisata harus disertai dengan adanya sumber daya yang ada dan tata kelola yang baik. Berbagai sumber daya yang ada harus diperhatikan. Pengendalian sumber daya harus dengan kontrol yang disiplin, agar sumber daya dapat digunakan dengan efektif dan tidak boros. Sumber daya penting dan riskan dalam pengelolaannya adalah sumber daya anggaran. Riyadi dan Bratakusumah (2004:38) menjelaskan tentang faktor sumber daya anggaran/finansial akan

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dari program pembangunan. Adapun menurut Salim yang dikutip dari Hadiwijoyo (2012:57) bahwa berapapun banyaknya modal yang dimiliki, pembangunan tidak akan terlaksana kecuali disertai dengan sumberdaya manajerial yang mampu mengelola modal itu untuk pembangunan. Pengelolaan yang dimaksud tersebut dikemukakan oleh Soewarno yang dikutip oleh Hadiwijoyo (2012:57) bahwa pengelolaan dan pengendalian adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. Adapun prinsip-prinsip perencanaan kepariwisataan menurut Yoeti yang dikutip oleh Hadiwijoyo (2012:58) di ruang lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan pengembangan kepariwisataan haruslah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan regional atau nasional dari pembangunan perekonomian negara
- b) Menggunakan pendekatan terpadu
- c) Berada dibawah koordinasi perencanaan fisik daerah tersebut secara keseluruhan
- d) Perencanaan fisik daerah untuk tujuan daerah wisata harus berdasarkan penelitian pada faktor geografisnya, tidak hanya berdasarkan faktor administrasi saja
- e) Memperhatikan faktor ekologi
- f) Memperhatikan faktor sosial yang ditimbulkan
- g) Perencanaan pariwisata di daerah yang dekat kawasan industri, perlu diperhatikan pengadaan fasilitas hiburan guna mengantisipasi jam kerja buruh yang singkat di masa datang
- h) Pariwisata tersebut bagaimanapun bentuk dan tujuan pengembangannya tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu, dalam pengembangannya perlu memperhatikan kemungkinan peningkatan kerjasama dengan prinsip-prinsip saling menguntungkan

Pada pengelolaan pariwisata diperlukan perhatian kepada peran media. Media digunakan sebagai alat untuk mempercepat serta memudahkan kegiatan pariwisata. Hal tersebut dijelaskan menurut Pitana dan Diarta (2009:155) untuk kelancaran media promosi pemasaran sebuah industri pariwisata adalah dengan membuat brosur, video, buku, dan berbagai sarana informasi yang menginformasikan jasa atau produk pariwisata di satu daerah. Adapun untuk kegiatan perencanaan dan pengelolaan pariwisata diperlukan dukungan sumber daya manusia bidang pariwisata. Menurut Siagian (2005:27) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia yang baik dan benar akan berdampak pada peningkatan kontribusi dari para pekerja organisasi, dan tujuan organisasi dapat tercapai.

5. Pengembangan Industri Pariwisata

Pengembangan industri pariwisata adalah tugas semua pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dengan kerjasama yang dilakukan berbagai pihak akan menguntungkan semua pihak yang terlibat tidak terkecuali masyarakat. Adapun menurut Munasef yang dikutip oleh Hadiwijoyo (2012:57), pengembangan pariwisata adalah semua kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua prasarana dan sarana penunjang, menyediakan fasilitas, jasa dan barang guna melayani kebutuhan wisatawan. Ketika melakukan pengembangan pariwisata, hal yang perlu dibenahi tidak hanya obyek wisata ataupun akomodasi dan restoran. Tetapi juga segala hal yang dapat menunjang pengembangan pariwisatanya. Selain itu, keamanan dan kenyamanan wisatawan tidak boleh dianggap remeh dan justru harus diutamakan agar

wisatawan bisa berkunjung dalam jangka waktu yang panjang dan berulang untuk menjadi tujuan wisata di lain waktu.

Adapun hal yang wajib diperhatikan yaitu penginapan bagi para wisatawan, cendera mata atau oleh-oleh barang wisata yang harus dikelola dengan baik. Dan juga harus didukung dengan promosi pariwisata agar daya tarik kegiatan pariwisata tersebut tersebar secara luas hingga ke luar daerah tujuan wisata tersebut. Menurut UU No. 10 Tahun 2009, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

Menurut UU No. 10 Tahun 2009, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Dan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud diatas merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Menurut Inskeep dalam Hadiwijoyo (2012:59) secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Atraksi dan Aktivitas Pariwisata

Semua atraksi baik yang bersifat alami, maupun khusus serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kawasan yang menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

b. Akomodasi

Hotel dan fasilitas lain yang sejenis, serta jasa layanannya dimana wisatawan menginap selama waktu kunjungannya.

c. Fasilitas dan Jasa Layanan Wisata

Fasilitas-fasilitas jasa pelayanan yang diperlukan untuk pengembang pariwisata, antara lain meliputi: operasional tour dan travel, restoran dan kafe, bank dan *money changer*, kantor informasi pariwisata, fasilitas keamanan dan sebagainya

d. Fasilitas dan Jasa Layanan Transportasi

Fasilitas dan jasa layanan meliputi kemudahan akses transportasi masuk ke kota dan area pengembangan, sistem transportasi internal.

e. Infrastruktur lainnya, seperti air, listrik, dan telekomunikasi

f. Elemen Institusional

Elemen ini penting untuk mengatur dan mengembangkan pariwisata. Elemen institusional antara lain berupa program perencanaan, pendidikan dan pelatihan SDM, promosi dan pemasaran strategis, kebijakan investasi, program pengendalian pengaruh ekonomi, dan lingkungan sosial kultural.

6. Desa Wisata

1) Pengertian Desa Wisata

Departemen Pariwisata telah membuat program yang disebut pola PIR (Pariwisata Inti Rakyat), dengan mengembangkan pembangunan desa wisata.

Adapun pengertian dari desa wisata adalah:

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR), yang dimaksud dengan Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misal: atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya (Priasukmana, 2001:38)

Dalam rangka pembangunan ekonomi desa berdasarkan kerakyatan, membangun desa wisata adalah sesuatu yang sangat relevan. Dengan dibangunnya desa-desa wisata di semua Daerah Tujuan Wisata (DTW) seluruh Indonesia, diharapkan akan terjadi pemerataan ekonomi, kesempatan berusaha, dan kerja. Kiranya tidak berlebihan dengan membangun desa wisata sekaligus dapat memberdayakan pembangunan masyarakat dalam bentuk:

- a. Menguntungkan usaha-usaha berskala kecil dan menengah yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan orang banyak, dan wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut;
- b. Mengembangkan usaha kerajinan dan menciptakan cendera mata yang memiliki ciri khas kedaerahan;
- c. Mengembangkan dan mengelola agrowisata untuk tanam-tanaman yang khas yang terdapat di desa yang bersangkutan;
- d. Mengembangkan dan membina ekowisata dengan melibatkan masyarakat yang terdapat disekitar proyek;
- e. Mengkoordinasikan kesenian tradisional yang ada untuk disuguhkan sebagai atraksi wisata bila wisatawan berkunjung ke daerah tersebut (Yoeti, 2000:143)

2) Persyaratan Desa Wisata

Sesuai dengan definisi desa wisata, desa-desa yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh bagi desa lainnya, penetapan

suatu desa sebagai desa wisata harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut:

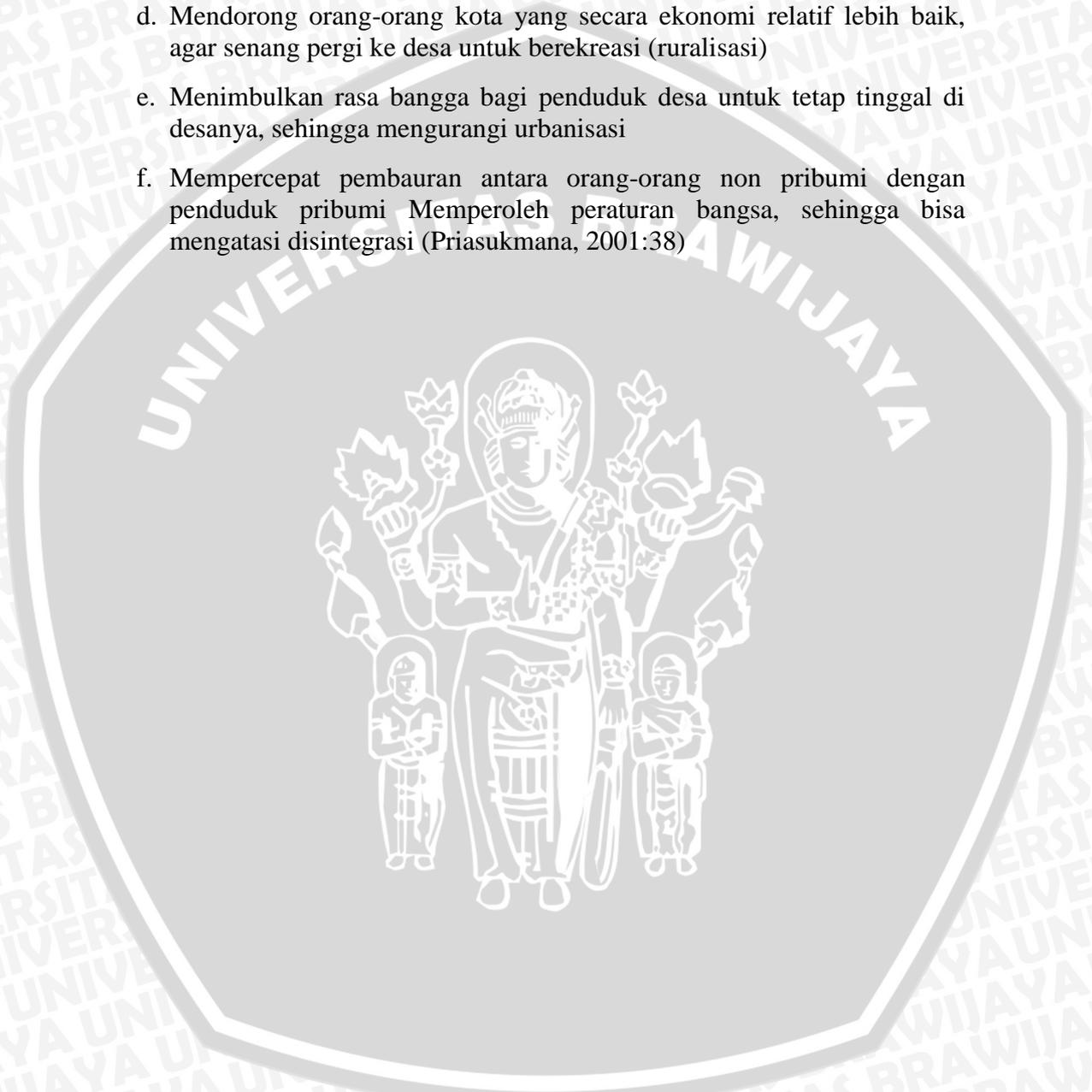
- a. Aksesibilitas baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi,
- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata,
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya,
- d. Keamanan di desa terjamin,
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai,
- f. Beriklim sejuk atau dingin,
- g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas (Priasukmana 2001:38)

3) Tujuan Pembangunan Desa Wisata

Pembangunan dilaksanakan pasti dengan memiliki tujuan tertentu. Demikian juga dengan pembangunan desa wisata. Secara garis besar, tujuan dari pembangunan desa wisata adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan jalan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya saing masyarakat dengan perekonomian swasta yang semakin mendominasi perekonomian. Lebih rinci, tujuan pembangunan desa wisata adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternatif
- b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar desa wisata

- c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi di desa
- d. Mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relatif lebih baik, agar senang pergi ke desa untuk berekreasi (ruralisasi)
- e. Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap tinggal di desanya, sehingga mengurangi urbanisasi
- f. Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan penduduk pribumi. Memperoleh peraturan bangsa, sehingga bisa mengatasi disintegrasi (Priasukmana, 2001:38)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2004:6) menjelaskan:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Penelitian kualitatif digunakan karena dapat membantu untuk mengungkap peristiwa-peristiwa riil di lapangan dan juga dapat mengungkapkan nilai-nilai abstrak (*hidden value*) dari penelitian ini. Pendekatan kualitatif sering digunakan dalam penelitian sosial disebut juga pendekatan naturalistik (Lincoln dan Guba, 1985 dalam Rohmad, 2009:11).

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar dapat melukiskan secara sistematis fakta dan menganalisis mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (studi pada Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) sehingga dapat

diperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana implementasi perda tersebut dalam kenyataan di lapangan di Kampung Wisata Kungkuk di Kota Batu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada hakikatnya mengacu pada permasalahan inti yang bersumber dari pengalaman peneliti atau dari pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah, maupun kepustakaan yang lain (Moleong 2004:97). Menurut Usman dan Akbar (2009:34) menjelaskan fokus penelitian atau pembatasan masalah ialah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian, dan faktor mana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian.

Fokus penelitian dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (studi pada Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) ini mengacu pada teori implementasi dari Edward III tentang beberapa indikator implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dikaji dari:
 - a. Komunikasi antar aktor yang berperan aktif dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013.

- b. Sumber daya terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013.
 - c. Sikap atau disposisi dari para pelaku implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013.
 - d. Struktur birokrasi dari pelaksana implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu tersebut di Kampung Wisata Kungkuk:
- a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilaksanakan. Lokasi dipilih untuk mendapatkan dan melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Kota Batu. Alasan dipilihnya Kota Batu sebagai lokasi penelitian karena Kota Batu dikenal di Indonesia sebagai salah satu kota tujuan pariwisata. Sebagai kota tujuan pariwisata, Pemerintah Kota Batu akan berusaha untuk meningkatkan fasilitas penunjang, seperti penginapan, daya tarik wisata, listrik, air, dan lain-lain, dan menjaga sarana dan prasarana penunjang (industri pariwisata) agar citra Kota Batu sebagai kota tujuan wisata tidak hilang.

Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dengan pertimbangan sebagai dinas teknis, dinas ini

memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kota Batu termasuk dalam mengembangkan sektor industri pariwisata dengan basis agrowisata/desa wisata yang sesuai dengan ikon Kota Batu sebagai Kota Wisata. Selain itu, dipilih Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebagai kawasan observasi untuk memperoleh data-data penguat yang dapat mendukung kelancaran skripsi.

D. Sumber dan Jenis Data

Untuk dapat memperoleh data yang sebenarnya dengan tepat, perlu dilakukan proses pengumpulan data di lapangan. Proses pengumpulan data tersebut berasal dari narasumber yang tepat dan dapat dijadikan pegangan keakuratan hasil penelitian nantinya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan dua jenis data tersebut yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang bertindak sebagai seseorang yang memberikan informasi dan menjawab semua pertanyaan peneliti dengan jelas dan lengkap. Narasumber tersebut adalah:

- a. Bapak Sariono, S.S, M.M. Kasubid Pariwisata dan Pertanian Bidang Perencanaan Ekonomi di Bappeda Kota Batu
- b. Bapak Muljo Adji, Bc.Kn selaku Kasie Bimbingan dan Pelatihan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

- c. Bapak Suwito Pamungkas selaku Lembaga Koordinator Pariwisata Kampung Wisata Kungkuk dan Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Desa Punten

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang langsung berada di situs penelitian, dokumen yang dimaksud antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
- b. Pesona Kampung Wisata Kungkuk 2016
- c. Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata Di Destinasi Pariwisata
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara umum dapat dibedakan menjadi teknik pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena data yang dihasilkan ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Data yang diambil dalam sebuah proses penelitian haruslah *valid* yaitu dengan menggunakan metode penelitian di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menyatakan terus terang

kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka yang menjadi obyek peneliti telah mengetahui sejak awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti. Namun dalam suatu waktu, peneliti juga tidak berterus terang atau tersamarkan dalam observasinya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari jika ada suatu data yang dicari masih dirahasiakan oleh sumber. Kemungkinan, apabila peneliti berterus terang maka peneliti tidak diijinkan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2008:66).

Dalam penelitian ini, observasi/pengamatan dilakukan dengan observasi partisipan dimana peneliti ikut ambil bagian secara langsung dalam kegiatan yang diamati yaitu observasi dilakukan di Dinas Pariwisata dan di Kampung Wisata Kungkuk Kota Batu. Observasi partisipan yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh data primer sesuai fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab atau percakapan langsung antara dua orang atau lebih. Teknik wawancara ini berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan data lainnya. Dalam tahap ini peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mengadakan tanya jawab secara lebih lanjut dan memperjelas data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan bantuan panduan wawancara (Usman dan Akbar, 2009:52).

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur dimana peneliti sebagai pewawancara mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada narasumber terdiri dari Pak Sariono, Pak Muljo Adji, dan Pak Suwito Pamungkas. Hasil wawancara digunakan untuk melengkapi data primer yang sebelumnya diperoleh melalui observasi/pengamatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010:143).

Dokumen yang dijadikan acuan untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017, Pesona Kampung Wisata Kungkuk, Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata di Destinasi Pariwisata, dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan faktor penting yang mendukung berjalannya proses penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data. Penelitian kualitatif peran peneliti sendiri sangat penting, karena peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2000:121). Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri sebagai pihak yang melakukan penelitian dengan mengandalkan kemampuan berpikirnya untuk menangkap dan mencatat fenomena dan data sesuai fokus penelitian. Selain itu, ketika peneliti sendiri yang menjadi instrumen, peneliti dapat secara mudah memutuskan sesuatu melalui penilaian keadaan yang ada di lapangan.

2. Catatan

Catatan lapangan adalah tulisan yang merekam dan memaparkan fenomena apa saja yang ditangkap oleh peneliti terutama berkaitan dengan kebutuhan data sesuai fokus penelitian. Catatan lapangan adalah instrumen penelitian ketika peneliti melakukan observasi partisipan.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang terlebih dahulu dipersiapkan peneliti sebagai pedoman dalam melaksanakan

wawancara dengan narasumber. Peneliti membuat pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat berjalan dengan lancar dan dapat memperoleh data primer sesuai fokus penelitian.

4. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi ialah daftar yang berisikan panduan dalam menelusuri sebuah dokumentasi sehingga mempermudah peneliti dalam memperoleh data sekunder sesuai fokus penelitian.

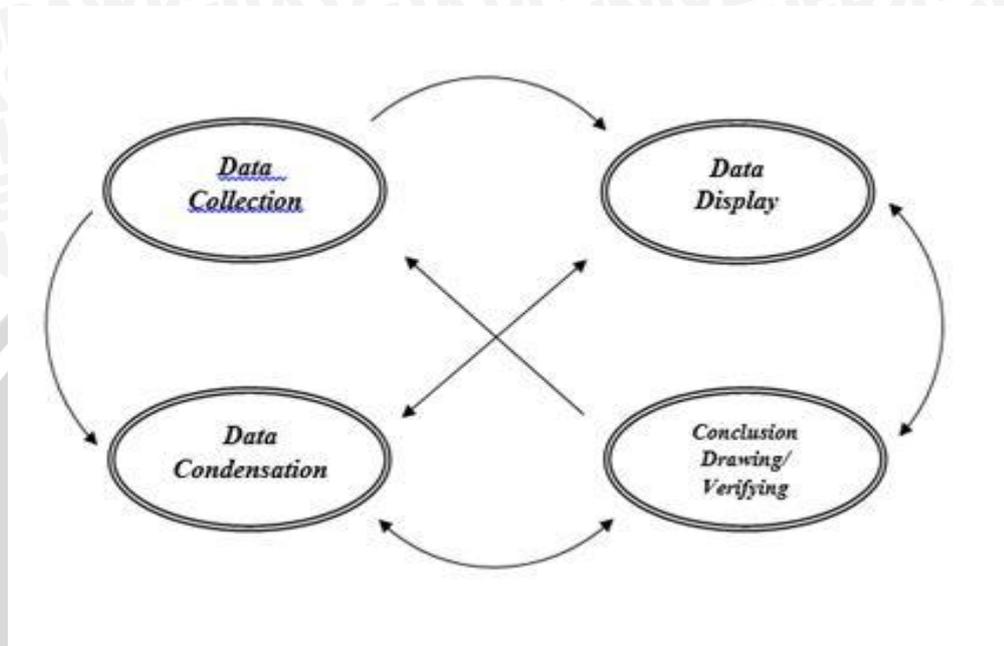
5. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang ialah perangkat yang mendukung peneliti dalam memperoleh data sesuai kebutuhan penelitian. Perangkat penunjang yang dimaksud di antaranya adalah alat tulis, alat perekam, dan kamera. Peneliti menggunakan alat tulis seperti bolpoin dan buku untuk mencatat hasil pengamatan melalui observasi partisipan dan hasil wawancara. Peneliti menggunakan alat perekam untuk merekam jawaban narasumber atas pertanyaan penelitian yang diajukan ketika melakukan wawancara. Peneliti menggunakan kamera untuk memotret objek yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam fokus penelitian.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan harus secara

kontinu sampai tuntas, hingga datanya menjadi jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 2: Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 33)

Beberapa komponen yang termasuk pada analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman seperti berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data yang telah diperoleh oleh peneliti di lapangan melalui proses penelitian (wawancara, observasi, dan dokumentasi) di kondensasi dengan cara dirangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Di tahap ini peneliti melakukan kondensasi data dengan cara memilih, mengkategorikan, dan membuat abstraksi catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai dikondensasi/direduksi.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk Catatan Wawancara, Catatan Lapangan, dan Catatan Dokumentasi. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Masing-masing data sudah diberi kode analisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan, Penarikan, atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Ini adalah langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif. Sesuai dengan data yang telah di kondensasi/direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari perumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti.

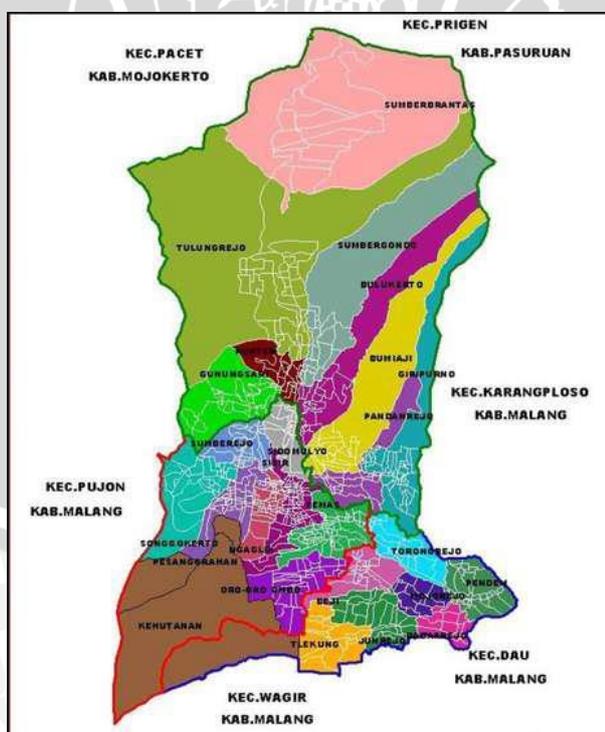
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Batu

Kota Batu merupakan daerah otonom yang termuda di Provinsi Jawa Timur. Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu : Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Luas Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19.908,72 ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Daerah lereng dan berbukit memiliki proporsi lebih luas dibandingkan dengan daerah dataran.



Gambar 3. Peta Kota Batu

Sumber: Statistika Daerah Kota Batu 2015

a. Kondisi Geografis Kota Batu

Keadaan geologi/tanah di Kota Batu secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis tanah yaitu : Andosol, Kambisol, Alluvial, Latosol. Dari keempat kategori tersebut menunjukkan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu. Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara 7°44',55,11' sampai dengan 8°26',35,45' Lintang Selatan dan 122°17',10,90' sampai dengan 122°57',00,00' Bujur Timur. Batas Kota Batu adalah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Prigen Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau
- Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Wagir, Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

b. Kondisi Pemerintahan Kota Batu

Kota Batu dipimpin oleh seorang Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2012. Pada pemilihan tersebut terpilih Bpk. Eddy Rumpoko sebagai Walikota Batu untuk yang kedua kalinya dengan masa bakti 2012-2017. Secara administratif, Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan dan 24 kelurahan/desa. Selama periode 2010-2013, baik jumlah kecamatan, desa dan kelurahan tidak ada perubahan. Kecamatan Bumiaji mempunyai jumlah desa yang paling banyak yaitu 9 desa sedangkan Kecamatan Batu terdiri dari 8

desa/kelurahan dan Kecamatan Junrejo hanya terdiri dari 7 desa/kelurahan. Semua desa/kelurahan di Kota Batu termasuk klasifikasi Desa Swasembada. Apabila dilihat dari jumlah RT/RW-nya, Kecamatan Batu mempunyai jumlah RT/RW yang paling banyak dibandingkan dua kecamatan lainnya. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Batu setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2011 tercatat 4.945 PNS, tahun 2012 4.987 tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar 4.738 PNS. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki hampir sama banyak dengan jumlah pegawai perempuan. Yaitu masing-masing sebesar 51,7 Persen pegawai laki-laki dan 48,3 pegawai perempuan. Kualitas PNS berdasarkan pendidikan di Kota Batu menunjukkan peningkatan yang cukup bagus., hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan pegawai dengan gelar sarjana, paling tinggi dari tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 56,06 persen. Dan yang berpendidikan SD hanya sebesar 1,4 persen. Meningkatnya kualitas PNS di Kota Batu diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sehingga terwujud sistem pemerintahan yang baik.

Pada Pemilu 2009, dari 24 partai yang ada di Kota Batu hanya 12 partai yang terwakili di DPRD. DPRD Kota Batu memiliki anggota 25 orang. Dari 12 partai yang mempunyai wakil di DPRD, PDI-P yang mempunyai wakil terbanyak yaitu 5 orang. Jumlah terbanyak kedua adalah Partai Demokrat, Golkar, PAN dan Hanura yaitu 3 orang. Ada 1 partai yang mempunyai wakil 2 orang dan 6 partai sisanya hanya mempunyai wakil 1 orang. Dari 25 anggota DPRD Kota Batu 17 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 68 persen, anggota

DPRD Kota Batu yang berjenis kelamin perempuan hanya 8 orang atau sekitar 32 persen.

Wilayah	2012	2013	2014
Kecamatan	3	3	3
Desa	19	19	19
Kelurahan	5	5	5
RW	237	237	237
RT	1.122	1.127	1.127
Jumlah PNS			
Laki-laki	2.594	2.452	2.452
Perempuan	2.351	2.286	2.286

Tabel 1. Statistik Pemerintahan Kota Batu

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, Pemerintah Kota Batu

Anggaran yang diperoleh Kota Batu pada tahun 2014 sebesar 701,47 milyar meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 592,87 milyar. Paling besar penerimaan pendapatan daerah bersumber dari bagian dana perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dibandingkan tahun 2013 dana perimbangan dari pemerintah pusat mengalami peningkatan pada tahun 2014. Tahun 2013 dana perimbangan hanya sebesar 466,59 milyar sedangkan tahun 2014 mencapai 489,84 milyar. Dari ketiga komponen dana perimbangan dana alokasi umum (DAU) mempunyai nilai yang paling besar yaitu 412,38 milyar diikuti dana dari PAD sebesar 78,29 milyar kemudian dana bagi hasil sebesar 47,11 sedangkan dana alokasi khusus sebesar 30,35 milyar.

Untuk membiayai pembangunan, pemerintah Kota Batu pada tahun 2014 menghabiskan anggaran sebesar 742,66 milyar rupiah seperti yang tercatat pada realisasi APBD, jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 669,39 milyar rupiah.

Anggaran	2012	2013	2014
APBD	563,71	592,87	701,47
PAD	10,79	59,67	78,29
Dana Perimbangan	391,47	466,59	489,84
DAU	324,77	374,36	412,38
DAK	16,59	23,43	30,35
DBH	50,11	81,73	47,11

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah (Milyar) Tahun 2012-2014

Sumber: Bagian Keuangan, Pemerintah Kota Batu

c. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 211.298 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 19,908 km², maka kepadatan penduduk adalah sebesar 1.060 jiwa per km². Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2014 adalah sebesar 1,17 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk ini tercatat mengalami sedikit kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,14 persen. Selama periode

2012 hingga 2014, pertumbuhan penduduk di Kota Batu relatif stabil. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah.

Uraian	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk	194.793	196.951	211.298
Pertumbuhan Penduduk	1,14	1,17	1,17
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	978	989	1.060
Sex Ratio (%)	100,76	100,80	101,79

Tabel 3. Indikator Kependudukan Tahun 2012-2014

Sumber: Statistika Daerah Kota Batu

Diantara ketiga kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu yang paling padat penduduknya. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk di Kecamatan Batu mencapai 2.012 jiwa per km², hal ini tidak mengherankan jika Kecamatan Batu merupakan kecamatan terpadat di Kota Batu karena di Kecamatan Batu merupakan pusat kegiatan pemerintahan maupun ekonomi. Kecamatan Bumiaji merupakan kecamatan yang terkecil kepadatan penduduknya karena sebagian wilayah Kecamatan Bumiaji merupakan hutan dan daerah lereng gunung.

d. Keadaan Pariwisata

Letak Kota Batu yang berada di lereng Gunung Panderman dan Arjuna membuat daerah TK II ini merupakan tempat tujuan wisata. Hal ini ditunjang

dengan beberapa tempat wisata yang memang sudah ada sejak jaman dulu seperti Selecta. Seiring berjalannya waktu tempat wisata di Kota Batu semakin bertambah jumlahnya baik itu wisata alam maupun wisata buatan, apalagi sejak dicanangkannya Kota Batu sebagai Kota Wisata pada tahun 2010, maka pembangunan di bidang pariwisata semakin digalakkan.

Dari beberapa tempat wisata di Kota Batu Kusuma Agro dan Cangar mengalami kenaikan jumlah pengunjung dibandingkan tahun 2013. Sebaliknya objek wisata Selecta, Jatim Park serta BNS mengalami penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2014. Sebagai tempat wisata yang berbasis pertanian, Kusuma Agro masih memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi Kota Batu. Kenaikan jumlah pengunjung Kusuma Agro cukup tinggi yaitu sepuluh kali lipat dibandingkan tahun 2013. Pada bulan Desember wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat wisata di Kota Batu berada pada puncaknya. Momen liburan diakhir tahun mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu.

Jumlah Pengunjung	2012	2013	2014
Jatim Park (1&2)	804.679	345.644	329.230
Selecta	528.818	756.174	702.740
Kusuma Agro	16.230	15.414	163.852
Cangar	229.889	232.203	255.908
BNS	294.444	310.226	271.901

Tabel 4. Pengunjung Objek Wisata Tahun 2012-2014

Sumber: Dinas Pariwisata

Adanya tempat wisata baru membuat banyak alternatif bagi para wisatawan yang berkunjung ke Batu, sehingga ada beberapa tempat wisata yang sedikit mengalami penurunan jumlah pengunjung. Museum Angkut yang mulai beroperasi di awal tahun menjadi primadona dibandingkan tempat wisata yang lain. Selain banyak tempat wisata Kota Batu juga mempunyai organisasi kesenian dan budaya yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu 70 organisasi, Kecamatan Junrejo 66 organisasi dan Kecamatan Bumiaji 46 organisasi. Sebagai penunjang kegiatan pariwisata di Kota Batu.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu

a. Kondisi Umum

Desa Punten termasuk daerah pegunungan yang terletak di Kaki Gunung Arjuno dengan ketinggian 800 meter sampai dengan 1150 meter dari permukaan air laut. Desa Punten termasuk dalam Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Luas Desa Punten 281.935 Ha dengan perincian luas sawah (irigasi teknis 36 Ha dan irigasi setengah teknis 39,644 Ha), pekarangan/permukiman (permukiman umum 56,501 Ha; perkantoran/sekolahan 1,420 Ha; tempat ibadah 0,9 Ha; lapangan 0,47), Ha; tegalan (12,080 Ha), hutan negara (125 Ha), dan lain-lain (jalan umum 2 Ha; makam umum 2 Ha; lainnya 2,62 Ha). Desa Punten memiliki 4 dusun yang terbagi ke dalam beberapa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan rincian berikut: Dusun Krajan terdiri dari 3 RW dan 14 RT, Dusun Gempol terdiri dari 1 RW dan 5 RT, Dusun Kungkuk terdiri dari 2 RW dan 9 RT, dan Dusun Payan terdiri dari 2 RW dan 7 RT.

Adapun batas – batas Desa Punten yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tulungrejo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumbergondo dan Bulukerto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunungsari

b. Visi dan Misi Desa Punten

Visi Desa Punten adalah *“Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera yang Didukung Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Budaya”*.

Misi Desa Punten adalah:

1. Terwujudnya manajemen Desa Punten yang akuntabel, aspiratif, efektif, dan efisien serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
2. Terwujudnya pemberdayaan aparatur pemerintah desa yang disiplin, bersemangat, kreatif dan inovatif serta memiliki komitmen pengabdian tinggi.
3. Terwujudnya pemanfaatan aset dan potensi desa untuk pengembangan di segala bidang kehidupan masyarakat.
4. Terwujudnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat dengan ditunjang SDM, SDA, SDB yang dinamis dan lestari.

3. Gambaran Umum Situs Penelitian Pengelolaan Kampung Wisata Kungkuk (KWK)

a. Latar Belakang Kampung Wisata Kungkuk (KWK)

Kampung Wisata Kungkuk (KWK) adalah dusun yang menjadi bagian dari Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Kampung Wisata Kungkuk adalah sebuah solusi peningkatan ekonomi masyarakat karena saat itu pada tahun 1999 terjadi kerusakan total pertanian apel yang merupakan mata pencaharian satu-satunya di Dusun Kungkuk. Pada tahun 2009 mulai dibentuk adanya Pokdarwis, atau kelompok sadar wisata, yang diketuai oleh Bapak Suwito Pamungkas, sekaligus sebagai penggagas dibentuknya Kampung Wisata Kungkuk. Banyak potensi yang dapat digali dan akhirnya dibuat sebagai paket wisata edukasi bisnis dari berbagai sektor. (Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Suwito Pamungkas pada tanggal 19 Agustus 2016)

Kampung Wisata Kungkuk (KWK) jika dilihat dari sejarahnya mulai awal terbentuknya hingga saat ini tergolong salah satu desa wisata yang berhasil dan berkembang. Diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Suwito Pamungkas pada tanggal 19 Agustus 2016 tentang perjalanan beliau membangun Kampung Wisata Kungkuk adalah sebagai berikut:

“Kungkuk dimulai tahun 2007, belum ada program pokdarwis, desa wisata, belum ada. Dulu saya kedatangan tamu yang notabene teman saya yang bekerja sebagai pegawai hotel. Dia sudah pengalaman dalam hal pariwisata. Dia main kesini, lihat-lihat desa, keliling-keliling gitu terus ngomong ke saya kalau Kungkuk ini bisa dijual. Waktu itu belum ada apa-apanya disini. Dulu pernah ada tamu dari mancanegara. Mereka kesini dari informasi orang-orang saja, katanya *pengen* tahu kebun apel yang terdekat, terus ditunjukkan ke Kungkuk sini sama orang-orang, waktu itu tahun 2007 masih banyak kebun apel disini, dulu tiket masuk wisata petik apel ini dipatok tarif sama warga dikasih 12 ribu rupiah. Dulu turisnya minta

nginep, akhirnya saya beranian membuat homestay 5 rumah, buat tamu keluarga. Terus mereka bilang nyaman disini. Nah dari situ saya mulai nyambung soal pariwisata, mulai akhirnya saya kemasi semua sampek 2 tahun 2009 mulai ramai-ramainya Kungkuk lantas vakum karena banyak pro-kontra masyarakat, banyak orang-orang berkepentingan (partai) masuk sini, lantas saya mengundurkan diri, akhirnya vakum sampai 2011 pertengahan. Kemudian Kepala Dinas Pariwisata waktu itu masih Bu Mistin datang kesini ngasih saya semangat kalau Kampung Wisata Kungkuk itu sudah banyak dikenal masyarakat luas sebagai kampung wisata, saya disuruh membangun lagi Kungkuk ini. Saya waktu itu sudah tidak nyambung lagi. Tapi waktu itu Bu Mistin semangat sekali mendorong saya, ditambah waktu itu ada dorongan dari pemerintah terkait masalah pendanaan, pembangunan fasilitas seperti toilet umum, alat-alat untuk outbond juga, akhirnya saya semangat lagi membangun Kungkuk ini, tapi untuk mengembangkan ini masih sulit sekali. Lalu tahun 2010 ada program dari Kementerian Pariwisata disuruh bikin Pokdarwis. Pokdarwis itu adalah Kelompok Sadar Wisata yang ada di desa. Seperti di Desa Punten sini ada Pokdarwis. Kalau di Kungkuk sendiri itu ada Lembaga Kampung Wisata atau LKP. Saya sendiri ikut dua-duanya. Inginnya itu Pokdarwis disini untuk mengembangkan satu desa, ada berapa perdukuan dijadikan paket semua mas. Nah berhubung di Pokdarwis programnya hanya formalitas, jadi jalannya sulit sekali. Dulu di Batu itu ada 14 Desa wisata, sekarang tinggal 4 yang masih jalan, termasuk Kungkuk ini. Kalau bicara Desa Wisata kan hal utamanya adalah aset, nah kalau desa wisata kan asetnya milik masyarakat, jadi apapun kegiatannya harus persetujuan masyarakat.”

b. Potensi

Keunggulan Kota Batu yang memiliki potensi alam yang bagus tersebar merata hampir di tiap kecamatan hingga desa-desanya. Salah satunya ada pada Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten. Kampung Wisata Kungkuk ini memiliki keunggulan berupa wisata edukasi bisnis yang terbagi menjadi beberapa bidang, seperti: pertanian, peternakan, industri, *workshop* kewirausahaan, budaya, outbond, dan *homestay*.

c. Kependudukan Kampung Wisata Kungkuk (KWK)

Jumlah warga di Kampung Wisata Kungkuk mencapai total 1050 jiwa (penduduk laki-laki dan perempuan). Selain itu, di Kampung Wisata Kungkuk terdiri dari enam (6) Rukun Warga (RW), dan total ada 296 kepala keluarga. Mayoritas warga Kampung Wisata Kungkuk memiliki mata pencaharian sebagai petani (98% petani, 2% Wiraswasta). (Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Suwito Pamungkas pada tanggal 19 Agustus 2016)

d. Visi Kampung Wisata Kungkuk (KWK)

Visi Kampung Wisata Kungkuk (KWK) adalah:

- a) Menjadikan Kampung Wisata Kungkuk sebagai wisata edukasi bisnis di bidang pertanian, peternakan, industri keripik yang bertaraf internasional
- b) Menjadikan Kampung Wisata Kungkuk sebagai kampung yang mandiri, kaya, dan sejahtera
- c) Sebagai kampung yang berperan serta mencetak pengusaha-pengusaha baru demi kesejahteraan bangsa Indonesia

e. Misi Kampung Wisata Kungkuk (KWK)

Kampung Wisata Kungkuk memiliki beberapa misi hasil turunan dari visinya, yaitu:

- a) Meningkatkan perekonomian warga dusun kungkuk melalui desa wisata
- b) Menjadikan pertanian jeruk di Dusun Kungkuk sebagai ikon Kota Batu

- c) Memberikan tambahan penghasilan para petani dengan membuat wisata petik jeruk, sehingga para petani bisa menjual langsung ke wisatawan hasil pertaniannya
- d) Menciptakan *market* sendiri dengan mendatangkan wisatawan ke Dusun Kungkuk bagi para pemilik *home industry*
- e) Menjadikan semua potensi yang ada di Dusun Kungkuk dari sektor pertanian, peternakan, dan industri menjadi lokasi kunjungan wisata.
- f) Menjadikan rumah warga sebagai homestay nuansa desa yang ramah, bersih, beretika, aman, dan nyaman
- g) Melibatkan anak karang taruna dalam pengelolaan Kampung Wisata Kungkuk
- h) Memeratakan perekonomian warga dengan memberikan kesempatan untuk kreatif, inovatif, dan berkreasi dalam mendukung kesuksesan Kampung Wisata Kungkuk

4. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Kekayaan sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki Kota Batu merupakan modal yang perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan Pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, melestarikan alam,

lingkungan, dan sumber daya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, serta mengangkat citra Daerah.

Keberadaan Kota Batu sebagai kota pariwisata sudah lama dikenal oleh masyarakat umum karena sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki. Banyak orang berkunjung ke kota ini untuk berwisata dan menikmati indahnya pemandangan. Kunjungan wisata ini terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang semakin pesat. Karenanya, untuk mengatur perkembangan tersebut, maka segala aspek yang berkaitan dengan Kepariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum bagi wisatawan, pelaku pariwisata dan masyarakat Kota Batu. Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan ini sangat diperlukan untuk memajukan pariwisata di Kota Batu dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan karakteristik Kota Batu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam pengaturan penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Batu, bahkan Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud demi terciptanya Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Batu lebih baik dan terarah. Selain itu pula, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Batu dengan harapan mampu mendorong tumbuh berkembangnya usaha pariwisata dan iklim investasi bidang pariwisata.

Peraturan Daerah ini memuat materi yang meliputi, antara lain prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, kawasan strategis pariwisata dan desa wisata, jenis usaha pariwisata berikut pendaftarannya, wewenang pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, kelembagaan pariwisata, pelatihan dan penyuluhan di bidang pariwisata, standardisasi usaha dan sertifikasi tenaga kerja, tenaga kerja ahli warga asing, serta peran serta masyarakat.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Pengembangan Kampung Wisata Kungkuk

Kota Batu terkenal dengan *City Branding: Shining Batu*, sekaligus dikenal sebagai Kota Wisata Batu, yang artinya Kota Batu sebagai kota tujuan wisatawan. Kota Batu memiliki keunggulan berupa keindahan alam yang beragam, dan kemudian disulap menjadi tempat wisata alami, maupun buatan. Kota Batu juga memiliki beberapa desa wisata yang diunggulkan menjadi daya tarik wisatawan. Pembangunan desa wisata ini mengacu kepada pembangunan berkelanjutan, jadi diharapkan pembangunan dan pengembangan desa wisata ini tidak merusak alam dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

Desa wisata adalah pemanfaatan lahan desa tanpa mengubah ciri dari desa tersebut, dan kemudian diberikan fasilitas tambahan wisata alami untuk memberikan daya tarik. Selain itu, keaslian desa menjadi daya tarik utama, yang diwujudkan melalui budaya asli desa, gaya hidup, kuliner, hingga produk andalan

atau khas desa. Keaslian ini harus didukung dengan keadaan ekonomi, sosial, budaya, dan secara fisik desa seperti lahan pertanian dan kegiatannya, bentang alam, jasa, pariwisata, dan juga sejarah yang unik. Masing-masing kawasan wisata (tidak hanya desa wisata) di Kota Batu memiliki organisasi yang dinamakan Pokdarwis atau kelompok sadar wisata.

Maksud dari dibentuknya Pokdarwis ini adalah untuk mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kampung Wisata Kungkuk, atau lebih banyak dikenal dengan KWK, terletak di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, adalah salah satu desa yang digunakan sebagai *pilot project* pengembangan desa wisata di Kota Batu. Banyak orang salah mengenal dengan sebutan “Desa Kungkuk”. Padahal, sebenarnya nama Kungkuk adalah nama dari salah satu dusun di Desa Punten. Berdasarkan wawancara singkat dengan Bapak Muljo Adji sebagai Kasie Bimbingan dan Pelatihan tanggal 22 Juni 2016 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu menjelaskan tentang kesalahpahaman itu:

“Perlu diketahui kalau *sampean* melakukan riset di Kampung Wisata Kungkuk itu nomenklatur yang benar adalah Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Karena Kampung Wisata Kungkuk itu perdukuan. Kadang-kadang orang salah menafsirkan tentang kampung wisata kungkuk. Banyak yang *ngomong* kampung Desa Wisata Kungkuk, padahal nama aslinya Desa Punten.”

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, tidak hanya untuk desa wisata, tetapi juga untuk semua kawasan wisata adalah sumber daya manusianya. Pembangunan *skill* yang mumpuni untuk para sumber daya manusia adalah salah satu aspek dasar yang butuh dibangun lebih dahulu, sebelum dicanangkan pembangunan sebuah kawasan wisata seperti desa wisata. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Muljo Adji sebagai Kasie Bimbingan dan Pelatihan tanggal 22 Juni 2016 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu bahwa:

“Tupoksi saya itu khusus pelatihan-pelatihan yang mengarah pada pelaku pariwisata. Dari mereka tidak tahu menjadi tahu, seperti yang lagi nge-*in* sekarang untuk mendukung keberhasilan adanya MEA. Di UU jelas *kok*, seperti halnya sertifikasi, *Nah PR* kita itu melaksanakan pembangunan *skill*, bagaimana membangun kapabilitas masing-masing. Dan itu harus totalitas, kita juga turun tangan, *gak* boleh setengah-setengah”

Hal dasar yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan kepariwisataan adalah ada atau tidaknya payung hukumnya. Hukum adalah dasar atau landasan dari pembangunan. Ketika pembangunan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, maka pengembangan dapat dilakukan sesuai prosedur resmi dari pemerintah, tanpa ada halangan proses hukum. Untuk pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK), Desa Punten, yang termasuk dalam proyek desa wisata unggulan di Kota Batu, dalam skripsi ini yang digunakan sebagai dasar hukum adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, yang intinya, sudah sejauh mana efektivitas dari Perda ini digunakan sebagai patokan atau acuan dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK), Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

a. Komunikasi antar aktor yang berperan aktif dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013

Dalam melaksanakan Perda Kota Batu diperlukan adanya komunikasi yang jelas antar pihak yang bersangkutan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Dengan adanya komunikasi yang efektif maka pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, sehingga memperlancar pencapaian tujuan bersama.

Tentu saja komunikasi yang efektif ini harus diterapkan dengan baik. Namun sepertinya komunikasi untuk pengembangan desa wisata di Kota Batu kurang berjalan dengan baik. Secara umum dalam lingkup Kota Batu, hal tersebut senada dengan pernyataan dari Bapak Muljo Adji dalam wawancara pada tanggal 22 Juni 2016 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai berikut:

“Untuk mengangkat desa wisata harus ada dorongan selain dari pemerintah pusat juga dari pemerintah desanya. Kadang-kadang pemerintah desa sendiri nggak mau fokus membangun desanya sendiri. Contohnya dulu pernah ada di desa petik bunga. Banyak wisatawan tahu petik bunga ya di Desa Gumur, tapi karena tidak digarap dengan baik oleh pemerintah desa, apalagi masalah waktu itu setelah pemilihan kepala desa baru, dan tidak ada penurunan visi dari kepala desa yang lama ini untuk mengembangkan wisata petik bunga, jadi ya nggak jalan dengan baik. Apa jadinya? Mereka (wisatawan) sudah datang, kita (Dispar) sudah nyebar *booklet* juga, ketika wisatawan datang *eh* kondisi desa tidak terawat. Jadi perlu adanya peran antar stakeholder seperti pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan juga masyarakat sendiri.”

Selain itu, ada juga pendapat dari Bapak Sariono selaku Kasubid Pariwisata dan Pertanian, Bidang Perencanaan Ekonomi dalam sebuah wawancara tanggal 2 Agustus 2016 di Kantor Bappeda Kota Batu juga menyebutkan:

“Jelas ada hambatan dan pendukung di tiap program mas. Pasti ada di SDM, koordinasi yang tidak jalan atau tidak *nyampai*. Misal di desa A musim apel, desa B musim stroberi, desa C musim jeruk. Kalau ada koordinasi yang baik antar desa wisata nanti informasi untuk wisatawan jadinya enak mas bisa saling ngasih info dan diarahkan ke desa yang sedang musimnya yang menjadi tujuan wisatawan. Takutnya nanti kalau ada tertutup informasi jadi ketika wisatawan datang jadinya kecewa.”

Kegiatan promosi juga termasuk dalam salah satu kegiatan komunikasi. Promosi KWK dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pokdarwis Desa Punten, dan LKP Dusun Kungkuk sendiri. Kegiatan promosi yang paling ampuh adalah promosi sambung lidah, yaitu dari mulut ke mulut, seperti dari LKP KWK ke *travel agent* yang banyak mendatangkan wisatawan ke KWK. Kegiatan penyebaran *booklet* dinilai kurang efektif dan cenderung menghabiskan anggaran. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Suwito Pamungkas pada wawancara tanggal 19 Agustus 2016 sebagai berikut:

“Di Kungkuk ada lewat web, ada juga yang dari dinas pariwisata Kota Batu ada, yang lebih gencar dari dinasny. Tapi diluar itu, promosi kita paling banyak serahkan ke *travel agent*, ya nanti pembagiannya 50-50 mas. Promosi brosur zaman sekarang sudah tidak berfungsi mas. Dulu pernah saya coba sebar brosur, tapi ya saya liat langsung itu langsung dibuang sama orang, malah buang-buang anggaran mas.”

Komunikasi yang kurang lancar akan berimbas pada koordinasi tim. Koordinasi akan terganggu ketika komunikasi terjalin dengan sangat minim. Koordinasi pasti terdiri lebih dari satu aktor. Dalam pengembangan KWK, Dinas Pariwisata Kota Batu berperan sebagai dinas teknis atau sebagai koordinator tim pengembangan desa wisata, termasuk di KWK. Dinas Pariwisata telah mengupayakan untuk pengembangan desa wisata harus fokus pada satu desa dahulu sampai selesai. Namun dari aktor yang lain cenderung kurang bisa

berkoordinasi dengan baik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Muljo Adji selaku Kasie Bimbingan dan Pelatihan dalam wawancara tanggal 22 Juni 2016 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai berikut:

“Kita itu ibaratnya sebagai pilotnya pengembangan desa wisata, tapi kadang dari dinas yang lain itu *lho* yang *nggak* sinkron sama kita, kadang kita itu pengennya fokus ke satu desa dulu baru ke yang lain, *nah* dinas yang lainnya itu *nggak match*, kesana-kesini kemana-mana mas jadinya nanggung pembangunannya setengah-setengah.”

Jadi, berdasarkan data di lapangan, komunikasi adalah faktor penting dalam indikator implementasi sebuah kebijakan publik. Dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan adanya permasalahan seperti seringnya *miss* komunikasi, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antar aktor kebijakan, sehingga mempengaruhi tingkat dan minat wisatawan yang datang ke KWK. Dinas Pariwisata sudah memberikan fasilitas berupa penyebaran *booklet* untuk membantu promosi KWK. Namun kenyataan di lapangannya adalah dari dinas yang lain dan masyarakat memberikan informasi yang berbeda-beda, jadi upaya Dinas Pariwisata Kota Batu tadi kurang maksimal. Selain itu, tingkat komunikasi yang terjalin kurang baik juga mempengaruhi koordinasi tim, sehingga pengembangan KWK menjadi terhambat.

b. Sumber daya terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013

Sumber daya adalah faktor yang penting. Menurut Edward III, terdapat beberapa macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi. Semua macam

sumber daya memegang peranan penting masing-masing. Dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ini memiliki semua sumber daya ini.

1) Sumber Daya Manusia

Yang pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pengembangan KWK ini sumber daya manusia adalah faktor utama. Yang dimaksud SDM bukan hanya perkara jumlah atau kuantitas. Jadi, jumlah SDM yang banyak belum bisa dijadikan tolok ukur SDM yang mumpuni. Selain kuantitas, hal yang perlu dilihat dari SDM adalah kualitasnya. Walaupun tidak terlalu banyak, apabila SDM memiliki *skill* yang tinggi, disiplin, dan baik, maka bisa dikatakan SDM yang berkualitas.

Dalam pengembangan KWK di Desa Punten, Kota Batu ini, SDM terdiri dari bermacam-macam. Dinas yang ikut memiliki peran adalah Bappeda Kota Batu, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai dinas teknis yang bekerjasama dengan semua dinas di Kota Batu sesuai dengan kebutuhan. Selain kedua dinas diatas, ada juga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Punten, Lembaga Kampung Wisata Kungkuk, dan masyarakat Dusun Kungkuk. Selain itu, pihak-pihak pengelola pariwisata seperti travel, hotel, dan restoran. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat dari Bapak Sariono selaku Kasubid Pariwisata dan Pertanian, Bidang Perencanaan Ekonomi dalam sebuah wawancara tanggal 2 Agustus 2016 di Kantor Bappeda Kota Batu sebagai berikut:

“Aktor yang kami libatkan adalah SKPD terkait, termasuk kami (Bappeda). Sebagai dinas teknis yaitu dispar, dan juga stakeholder pelaku usaha pariwisata. Misalkan disini ada pihak hotel, restoran, travel, ada juga jatim park group kita libatkan untuk menyusun perda dan desa wisata, ada

juga pokdarwis setempat, seluruh desa wisata dilibatkan. Setiap desa dan kota memiliki pokdarwis masing2, ada juga tingkat kecamatan. Tokoh juga, pengusaha pariwisata, dan juga kepala desa kita libatkan untuk penyusunan atau pengembangan desa wisata.”

Jadi, jumlah SDM yang berperan dalam pengembangan di KWK dilihat dari segi kuantitas termasuk besar, namun dari kapasitas dan peran masing-masing masih belum bisa dibilang baik. Pihak pemerintah ada dinas pariwisata, dinas pekerjaan umum, dan bappeda. Ketiga dinas itu masih sulit berkoordinasi dengan baik untuk menjalan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya, masih sering terjadi pelemparan tanggungjawab, sehingga menyebabkan koordinasi yang buruk.

2) Sumber Daya Anggaran/Keuangan

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh dalam kelancaran implementasi sebuah kebijakan. sumber daya anggaran atau keuangan harus dipenuhi secara cukup untuk penyelenggaraan sebuah kebijakan. Dalam pemenuhan anggaran untuk pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sumber anggaran berasal dari APBD dan APBN. Termasuk di dalamnya dana dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bahkan ada dari pihak sponsor (KWK memiliki sponsor yaitu dari pihak Jatim Park Foundation).

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Bapak Sariono selaku Kasubid Pariwisata dan Pertanian, Bidang Perencanaan Ekonomi di Bappeda Kota Batu dalam wawancara tanggal 2 Agustus 2016 yaitu sebagai berikut:

“Jadi, anggaran direncanakan oleh bappeda berdasarkan RPJMD 5 tahunan walikota ketika akan mencalonkan memiliki visi misi. Nah

RPJMD itu adalah penjabaran atau janji-janji ketika calon itu terpilih. Visi misi kita kan pariwisata dan pertanian. Kegiatannya harus merujuk kesana. Nah pemilihannya berdasarkan musrenbang nantinya. Dana berasal dari APBD ada dari DAU. APBN ada 2, yaitu APBD tingkat 1 provinsi, pusat. Nah macamnya ada DAK, dan cukai. Ada dari CSR juga. Kalo dari CSR ini harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Contohnya di alun-alun itu dibuatkan saluran-saluran air untuk diminum langsung oleh pengunjung. Nah untuk sponsor ada di dusun kungkuk itu dinaungi oleh Jatim Park Foundation.

Untuk data penunjang, berikut adalah nominal APBD Kota Batu 2017:



Gambar 4. APBD Kota Batu 2017

Sumber: Bappeda Kota Batu

Gambar diatas adalah APBD Kota Batu Tahun 2017. Menurut Bapak Sariono selaku Kasubid Pariwisata dan Pertanian, Bidang Perencanaan Ekonomi di Bappeda Kota Batu, APBD Kota Batu 2016 juga terbilang di atas 800 milyar, karena sudah tersusun APBD 2017 maka APBD 2016 sudah tidak dapat dikeluarkan lagi. Untuk keterangan gambar, Pendapatan Daerah Kota Batu senilai Rp 822.180.107.664,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 124.057.978.289, dana perimbangan senilai Rp 627.807.267.000, dan lain-lain

PAD sebesar Rp 70.314.862.375. Secara keseluruhan dari pendapatan daerah, anggaran belanja aparatur sebesar 35,06% atau sebesar Rp 296.427.974.575. Sedangkan untuk belanja daerah anggaran sebesar Rp 844.813.121.972,00. Rinciannya untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 427.957.167.575, dana BL digunakan untuk hal yang berkaitan dengan pegawai/aparatur, seperti tunjangan, sertifikasi, honor, dan lain-lain. Sedangkan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 416.904.354.557. Dana BTL digunakan untuk pembangunan dan fokus untuk pelayanan publik/masyarakat. Secara keseluruhan dari belanja negara, anggaran belanja publik memiliki porsi sebesar 64,94% atau sebesar Rp 548.385.147.397.

Jadi, untuk anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pengembangan satu desa wisata diberikan dan terperinci ada dalam APBN dan APBD. Diantaranya ada dalam DAU dan DAK. Selain itu, anggaran didapat dari cukai dan CSR. Dana APBD diberikan jatah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sejauh ini, berdasarkan pernyataan dari Bapak Sariono, APBD Kota Batu selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan. Untuk tahun selanjutnya akan dipergunakan dengan lebih maksimal dan sesuai dengan jatah yang diberikan dalam APBD Kota Batu.

3) Sumber Daya Peralatan/Fasilitas

Sumber daya berikutnya adalah sumber daya peralatan/fasilitas. Sumber daya ini adalah bagian seperti pelengkapan fasilitas umum dan alat-alat penunjang pengembangan. Di Kampung Wisata Kungkuk (KWK), Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, pemerintah daerah telah berupaya membantu melengkapi

fasilitas-fasilitas umum seperti toilet umum, gapura selamat datang, hingga *site map* KWK yang berguna untuk mempermudah wisatawan yang berkunjung. Selain itu, dibutuhkan payung hukum yang berguna untuk melancarkan pengembangan di KWK, dan pemerintah daerah sudah memberikan itu.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Muljo Adji selaku Kasie Bimbingan dan Pelatihan pada 22 Juni 2016 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai berikut:

“Kita ada anggaran untuk itu mas, coba *sampean* datang ke Kungkuk itu kan ada gapura, nah itu kontribusi kita untuk membangun secara fisik seperti identitas Kampung Wisata Kungkuk dan kampung wisata yang lain. Ini sebenarnya awal saja mas untuk mendorong mereka, bisa atau *nggak* mereka mengembangkan itu. Dan ini harus betul-betul dilaksanakan. Bahwa nantinya di Batu ini agar dikenal orang, agar orang ngertinya ke Batu itu *nggak* cuman datang ke wisata buatan aja, tapi juga ke desa wisata, tapi yang baik. Anggaran bikin gapura tadi ya dari APBD. Ada juga fasilitas outbond dan toilet umum sudah kita lengkapi.”

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Sariono selaku Kasubid Pariwisata dan Pertanian, Bidang Perencanaan Ekonomi dalam sebuah wawancara tanggal 2 Agustus 2016 di Kantor Bappeda Kota Batu sebagai berikut:

“Kita memberikan fasilitas berupa kajian sesuai kebutuhan, contohnya dengan its, ub, dll. Dan juga apapun yang diperlukan untuk pengembangan desa wisata. Tapi yang lebih berperan disini adalah dinas teknis yaitu dinas pariwisata. Selain itu kita juga ditugasi untuk membuat perda untuk payung hukum mereka agar nanti perjalanannya juga enak dan tidak terkendala”

Beberapa fasilitas yang telah diberikan untuk KWK adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Penunjuk Arah Masuk ke KWK
 Sumber: Peneliti Sendiri



Gambar 6. Gapura Selamat Datang
 Sumber: Peneliti Sendiri



Gambar 7. Toilet Umum
Sumber: Peneliti Sendiri



Gambar 8. Wisata Home Industri Keripik
Sumber: Peneliti Sendiri

Untuk sumber daya peralatan/fasilitas ini, Dinas Pariwisata Kota Batu telah membantu memfasilitasi pembangunan fisik dari KWK, seperti mendirikan gapura selamat datang sebagai pengenalan KWK dan toilet umum. Selain itu juga sudah diberikan fasilitas berupa payung hukum dan kajian-kajian teknis dengan beberapa instansi pendidikan untuk pengembangan KWK, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi mengarah pada pemenuhan informasi yang jelas, terbuka, dan merata kepada semua lapisan aktor kebijakan. Selain itu, masing-masing aktor juga diharapkan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan tugas masing-masing tanpa menyalahgunakan wewenang. Kejelasan informasi sangat mempengaruhi kinerja aktor kebijakan di lapangan.

Dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, pembekalan atau *briefing* sudah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Batu kepada para aktor kebijakan pengembangan desa wisata. Pernyataan ini diperjelas oleh Bapak Sariono selaku Kasubid Pariwisata dan Pertanian, Bidang Perencanaan Ekonomi dalam sebuah wawancara tanggal 2 Agustus 2016 di Kantor Bappeda Kota Batu sebagai berikut:

“Jadi dimana akan dibangun atau pengembangan kita kasih penjelasan hingga detail. Contohnya di Batu ini akan dibangun Dino Park (Jatipark 3). Nah ini prosesnya panjang, ada *mechanical engineering*, sosialisasi, melibatkan SKPD terkait dan masyarakat harus ada izin, nantinya ada MoU, intinya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, jangan sampai dibangun pariwisata setempat malah mematikan masyarakat sekitar. Nah sama halnya dengan desa wisata juga demikian.”

Sumber daya informasi dan kewenangan yang digunakan untuk pengembangan di KWK seperti yang disampaikan oleh informan yaitu sudah diberikan kepada masyarakat. Untuk pengembangan dan pembangunan desa wisata melalui prosedur yang sama dengan pembangunan JatimPark 3, harus melalui beberapa tahap dan prosedur yang panjang.

c. Disposisi dari para pelaku Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013

Disposisi dapat diartikan sebagai sikap. Dalam kasus ini yang dilihat adalah sikap dari masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah untuk pengembangan desa wisata di Kampung Wisata Kungkuk (KWK), Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Disposisi juga menunjukkan sikap dari masyarakat Desa Punten yang bersinggungan langsung dengan upaya Pemerintah Daerah Kota Batu terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk. Fakta yang terjadi di lapangan yaitu masyarakat KWK memberikan disposisi yang positif, atau menerima dengan baik yang ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat untuk mengelola KWK.

Pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Suwito Pamungkas dalam kesempatan wawancara pada tanggal 19 Agustus 2016 sebagai berikut:

“Ya masyarakat Kungkuk sini *alhamdulillah* mendukung mas, ya walaupun tidak 100 persen. Kenapa saya bilang masyarakat disini mendukung? Saya melihatnya yang paling utama kan jelas dari partisipasinya. Baik berupa hanya sebatas fasilitator lahan, hingga pendampingan yang mereka berikan ketika datang rombongan (tamu). Dalam arti 100 persen dalam pola pikir orang desa disini “*Ra Sugih Rapopo Wes*”. Sebenarnya kalau diamati itu cukup banyak pemasukan

dengan adanya wisata ini, Cuma sekarang belum begitu kelihatan hasil yang signifikan ”

Disposisi dari masyarakat KWK bisa dibilang bagus. Masyarakat antusias dengan adanya pengembangan KWK menjadi sebuah kampung wisata yang lebih baik lagi, selain itu dari *mindset* masyarakat sendiri tidak harus mendapatkan untung yang besar untuk jerih payah masyarakat untuk mengembangkan KWK. Dapat diberikan penilaian bahwa materi bukan satu-satunya tujuan dari masyarakat KWK.

d. Struktur Birokrasi dari Pelaksana Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013

Struktur birokrasi memberikan peranan yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan atau implementasi peraturan daerah. Struktur birokrasi salah satunya memberikan kejelasan tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi. Adanya struktur birokrasi dapat mencegah adanya program kerja atau tugas yang bertumpuk antar aktor yang berperan.

Dalam perjalanan implementasi perda Kota Batu ini banyak aktor yang dilibatkan. Secara umum hampir seluruh elemen masyarakat mulai dari dinas-dinas pemerintah seperti Bappeda, Dinas Pariwisata, hingga masyarakat Kampung Wisata Kungkuk juga termasuk di dalamnya. Namun, untuk pengurus (dari dinas) pengembangan KWK secara tertulis masih belum ada, sepenuhnya masih diserahkan kepada dinas teknis, yaitu Dinas Pariwisata. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Sariono selaku Kasubid Pariwisata dan Pertanian, Bidang Perencanaan

Ekonomi dalam sebuah wawancara tanggal 2 Agustus 2016 di Kantor Bappeda

Kota Batu:

“Struktur birokrasi untuk desa wisata kami belum ada. Harapannya jika nanti pengembangan desa wisata, kita ingin membentuk badan umum milik desa (BUMD) sendiri diharapkan memegang penuh pengembangan desa wisata itu sendiri. Jika dari proses perijinan tetap melalui pemerintah, seperti bappeda, dispenda, nadan penanaman modal, KLH, dinas perhubungan, dinas umum, dll.”

Pengembangan KWK di Desa Punten ini menurut hipotesis peneliti memang belum ada tim khusus yang menangani secara penuh. Pernyataan sementara ini diperkuat oleh pendapat dari Bapak Muljo Adji selaku Kasie Bimbingan dan Pelatihan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu pada kesempatan wawancara tanggal 22 Juni 2016 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Bapak Muljo Adji memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kalau selama ini, pelaksana teknis pengembangannya pasti dari Dinas Pariwisata mas, tapi juga harus ada kerjasama dengan dinas yang lain, tapi saya melihat belum adanya sinergitas dan dibilang sebagai tim. Kayak pembangunan desa punten itu, saya rasa hanya per-dinas saja, padahal seharusnya mengerucut. Ya kita pernah mengajak gitu mas secara terpadu, tapi ya gitu.. Ya namanya orang ya mas, kadang suka *nggak mau ribet*, jadi ya hanya diserahkan ke kami (Dinas Pariwisata).”

Struktur organisasi dari tim pengembangan desa wisata sendiri diakui tidak ada secara tertulis, hanya sebatas koordinator yaitu dari Dinas Pariwisata yang membawahi semua dinas yang bersangkutan. Hal ini juga memberikan efek yang buruk karena akan muncul banyak ketidakjelasan kerja. Masalah lain, menurut Bapak Muljo Adji, peran dari Dinas Pariwisata cenderung pasif dan terbatas dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK), hanya sebatas

pendampingan dan pembinaan. Beliau berharap adanya keaktifan yang nyata dari masyarakat desa. Selain itu, dalam kesempatan wawancara, Bapak Muljo Adji juga memberikan penjelasan bahwa dari Dinas Pariwisata sendiri sebenarnya masih belum ada tim khusus untuk pengembangan desa wisata, hanya sebatas pendampingan. Beliau juga ingin adanya sinergi yang baik antar dinas, masyarakat desa, dan perguruan tinggi, karena dengan melalui riset-riset yang dilakukan mahasiswa juga dapat memunculkan temuan masalah baru yang nantinya dapat diselesaikan bersama.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Perda Terhadap Pengembangan Kampung Wisata Kungkuk

a. Faktor Pendukung

1) Kondisi Alam

Faktor pendukung adalah hal-hal yang dapat memperlancar kegiatan implementasi peraturan daerah Kota Batu. Faktor pendukung yang pertama adalah kondisi alam. Kondisi alam di Kota Batu seperti yang telah diketahui oleh banyak orang menyuguhkan keindahan alam yang menawan. Selain itu, hawanya yang sejuk dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlama-lama di Kota Batu. Hawa sejuk Kota Batu didukung oleh banyaknya jumlah hutan dan persawahan. Kota Batu juga diuntungkan dengan letaknya yang termasuk dalam dataran tinggi, yaitu 700-1.700 m di atas permukaan air laut, dan juga dikelilingi oleh beberapa pegunungan yang mempertegas kesejukan udara di Kota Batu,

beberapa diantaranya adalah Gunung Arjuno, Gunung Butak, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan lain-lain.

Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Bapak Sariono selaku Kasubid Pariwisata dan Pertanian, Bidang Perencanaan Ekonomi dalam sebuah wawancara tanggal 2 Agustus 2016 di Kantor Bappeda Kota Batu, yang menyebutkan:

“*Nah* untuk faktor pendukungnya adalah kondisi kita mas. Kondisi kita banyak seperti pegunungan, hutan, pertanian, dan itu yang menjadi nilai plus kita. Apapun obyek wisata yang disediakan dan dibangun harus sesuai dengan itu. Dan yang penting masing2 wisata tidak boleh sama mas, harus beda agar tempat-tempat kita mempunyai ciri khas.”

Berikut suasana alam di Kampung Wisata Kungkuk (KWK):



Gambar 9. Jalur Motor *Trail* yang Menjadi Wisata Andalan KWK
Sumber: Peneliti Sendiri



Gambar 10. View Kota Batu dari Camp Ground di KWK
Sumber: Peneliti Sendiri



Gambar 11. Wisata Peternakan Kuda
Sumber: Peneliti Sendiri



Gambar 12. Kebun Mawar

Sumber: Peneliti Sendiri

Selain itu, kondisi alam di semua Desa Wisata di Kota Batu, salah satunya Kampung Wisata Kungkuk juga sangat mendukung untuk memperkuat citra Kota Batu sebagai Kota Wisata Batu. Pernyataan Kota Batu sebagai kota agrowisata telah banyak diketahui oleh masyarakat. Diperkuat oleh ragam potensi pertanian dan perkebunan di beberapa desa wisata andalan Kota Batu yang menyediakan seperti wisata petik apel, wisata kebun stroberi, petik jeruk, dan lain sebagainya.

Pernyataan di atas didukung oleh Bapak Suwito Pamungkas selaku Sekretaris Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Punten, dan Koordinator Lembaga Koordinator Pariwisata (LKP) Kampung Wisata Kungkuk (KWK) pada wawancara tanggal 19 Agustus 2016 sebagai berikut:

“Jadi, Desa Wisata di Batu ini sebetulnya adalah program penunjang Kota Batu sebagai Kota Wisata. Dengan tidak terlepas dari prinsip agrobisnis. Masing-masing desa punya ikon pertanian sendiri. Di KWK Punten punya Keprok Jeruk Punten, di Torongrejo ada Petik Apel, di Pandan ada Stroberi, supaya ada komunikasi antar desa yang ditunjang dengan potensi desa masing-masing, seperti *outbond*, *camping*, dan lain-lain itu sebagai fasilitas umum penunjang, utamanya itu ya agrobisnis.”

Berdasarkan data di atas, disimpulkan bahwa Kota Batu memiliki kondisi alam yang sangat mendukung sebagai Kota Wisata Batu atau KWB. Kota Batu sebagai tujuan wisata sudah dikenal banyak wisatawan domestik maupun asing. Kampung Wisata Kungkuk (KWK) dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan wisatawan apabila ingin menikmati kondisi alam Kota Batu, karena disana menyediakan beberapa paket wisata yang memomorsatukan keunggulan kondisi alam yang bagus, seperti wisata petik jeruk, *outbond*, *camp ground*, dan perah susu sapi. Selain itu di KWK juga menyediakan wisata budaya seperti tari daerah dan wisata budaya khas KWK sendiri.

2) Partisipasi Masyarakat

Faktor pendukung yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat di Kampung Wisata Kungkuk (KWK), Desa Punten sebagian besar antusias dalam pengembangan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap KWK. Terbukti banyak masyarakat yang ingin terlibat dalam pengelolaan KWK dan cara menyambut wisatawan dengan baik, ramah, dan pengertian untuk menjelaskan apabila ada wisatawan yang bertanya tentang seluk-beluk KWK.

Pendapat diatas diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Muljo Adji selaku Kasie Bimbingan dan Pelatihan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu pada kesempatan wawancara tanggal 22 Juni 2016 sebagai berikut:

“Di Kungkuk itu secara potensi sudah kelihatan *kok*, sejauh mana peran masyarakat kepada desa, peran pokdarwis juga, sejauh mana juga kerjasama masyarakat disitu dengan desa yang lain. Harus sinergis.

Masyarakat Kungkuk itu lebih gampang mas kerjasamanya jika dibandingkan dengan yang lain.”

Ditambahkan juga pendapat dari Bapak Suwito Pamungkas selaku Sekretaris Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Punten, dan Koordinator Lembaga Koordinator Pariwisata (LKP) Kampung Wisata Kungkuk (KWK) pada wawancara tanggal 19 Agustus 2016 tentang partisipasi warga sebagai salah satu faktor pendukung berikut:

“Waktu itu ada dorongan dari pemerintah terkait masalah pendanaan, pembangunan fasilitas seperti toilet umum, alat-alat untuk *outbond* juga, akhirnya saya semangat lagi membangun Kungkuk ini, tapi untuk mengembangkan ini masih sulit sekali. Lalu tahun 2010 ada program dari Kementerian Pariwisata disuruh bikin Pokdarwis. Pokdarwis itu adalah Kelompok Sadar Wisata yang ada di desa. Seperti di Desa Punten sini ada Pokdarwis. Kalau di Kungkuk sendiri itu ada Lembaga Kampung Wisata atau LKP. Saya sendiri ikut dua-duanya. Inginnya itu Pokdarwis disini untuk mengembangkan satu desa, ada berapa perdukuan dijadikan paket semua mas.”

Berdasarkan data di atas, dapat diberikan kesimpulan bahwa masyarakat Desa Punten, khususnya pada daerah pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) memiliki disposisi yang tinggi, terbukti dari tingkat partisipasi yang aktif untuk mengelola KWK. Selain itu, warga pun juga senang untuk menyambut wisatawan yang datang ke KWK dengan ramah, melayani wisatawan dengan baik dan bersedia membantu wisatawan apabila dibutuhkan bantuan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah sesuatu yang dapat menghambat implementasi Perda untuk pengembangan KWK, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. terdapat beberapa faktor penghambatnya, diantaranya:

a) Kurangnya koordinasi sebagai tim teknis untuk pengembangan di KWK

Faktor penghambat pertama adalah tidak adanya tim yang menangani khusus permasalahan terkait desa wisata, dalam penelitian ini berarti di Kampung Wisata Kungkuk (KWK), Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kejelasan tentang tim teknis atau tim pelaksana pengembangan desa wisata seharusnya ada dan berjalan dengan baik agar pengembangan desa wisata berjalan efektif dan akuntabel, dikatakan akuntabel karena jika ada tim teknis, pasti ada penanggungjawab.

Hal tersebut disampaikan oleh pernyataan dari Bapak Muljo Adji selaku Kasie Bimbingan dan Pelatihan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu pada kesempatan wawancara tanggal 22 Juni 2016 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, yaitu sebagai berikut:

“Kalau selama ini, pelaksana teknis pengembangannya pasti dari Dinas Pariwisata mas, tapi juga harus ada kerjasama dengan dinas yang lain, tapi saya melihat belum adanya sinergitas dan dibilang sebagai tim. Kayak pembangunan desa punten itu, saya rasa hanya per-dinas saja, padahal seharusnya mengerucut. Ya kita pernah mengajak gitu mas secara terpadu, tapi ya gitu.. Ya namanya orang ya mas, kadang suka *nggak mau ribet*, jadi ya hanya diserahkan ke kami (Dinas Pariwisata). Kita itu ibaratnya sebagai pilot-nya pengembangan desa wisata mas, tapi kadang dari dinas yang lain itu lho yang *nggak sinkron* sama kita, kadang kita itu pengennya fokus ke satu desa dulu baru ke yang lain, nah dinas yang lainnya itu *nggak match*, kesana kesini kemana mana mas jadinya nanggung pembangunannya setengah-setengah.

Berdasarkan data di lapangan, faktor penghambat yang pertama dikarenakan kurangnya koordinasi tim pengembangan KWK yang ditangani oleh Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai dinas teknis. Permasalahan utama dari

koordinasi yang kurang ini disebabkan sering terjadi pelemparan tanggungjawab yang telah diberikan dari dinas pariwisata ke dinas lainnya. Selain karena lempar tanggungjawab, dinas yang lain juga kurang bisa bekerjasama dengan dinas pariwisata untuk membangun satu desa wisata, pembangunannya cenderung menyebar ke beberapa desa, sehingga cenderung tidak fokus dan setengah-setengah.

b) Gagalnya kerjasama pengembangan KWK

Faktor penghambat yang kedua adalah gagalnya kerjasama yang terjalin antara Jatim Park Foundation dengan dua desa, yaitu Desa Punten dan Desa Gunungsari. Kegagalan ini berawal dari pergantian Kepala Desa Gunungsari yang baru. Pada awalnya, Kepala Desa Gunungsari yang lama telah menyepakati kerjasama ini, dengan tujuan awal untuk mengembangkan Desa Punten dan Desa Gunungsari menjadi sebuah desa wisata gabungan bernama Desa Mekarsari. Rencana awal yaitu wisatawan masuk dari KWK di Desa Punten, lalu menikmati wisata budaya disana, kemudian untuk melepas lelah, wisatawan dapat menggunakan fasilitas berupa kereta gantung yang langsung menuju Desa Gunungsari untuk menikmati wisata relaksasi berupa mandi bunga.

Namun pada akhirnya dengan adanya pergantian kepala desa yang baru, rencana pengembangan ini dibatalkan karena kerjasama ini dianggap hanya menguntungkan satu pihak, yaitu hanya pihak pengelola pariwisata saja, bukan untuk masyarakat desa setempat. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Suwito Pamungkas selaku Sekretaris Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

di Desa Punten, dan Koordinator Lembaga Koordinator Pariwisata (LKP) Kampung Wisata Kungkuk (KWK) pada wawancara tanggal 19 Agustus 2016 sebagai berikut:

“Sebetulnya dulu sudah diprogram, juga sudah diberikan *site plan*. Jadi Jatim Park Foundation berencana waktu itu menggabungkan 2 desa. Desa Punten sama Gunungsari. Waktu itu mau dijadikan desa wisata gabungan “Punten Mekarsari”, jadi Punten sama Gunungsari. Rencananya disini (di Desa Punten) wisata budayanya, disana (Desa Gunungsari) dibikin mandi bunga atau spa bunga. Linknya dari sini (Desa Punten) dulu startnya atau pintu masuknya. Dulu padahal rencananya mau dibikin Lift (Kereta Gantung). Sudah disiapkan ada 3 pilar awalnya, Desa Punten, Pemerintah terkait termasuk Jatim Park Foundation, sama Desa Gunungsari. Di Punten siap mas awalnya sama pemerintah juga, tapi Gunungsari nya yang gak siap mas. *Sakjane eman-eman* mas padahal dana yang untuk ini 4 milyar sudah siap. Padahal dulu sudah jelas mas mulai dari gambar *site plan* nya, pemborongnya, dan perancangnya total sudah bagus. Tapi ya gimana mas kalau masyarakatnya tidak mendukung ya gakbisa jalan *toh*? Berhubung Desa Gunungsari nya gagal ya gak bisa jalan semua. Mungkin ganti tahun bakal ada rencana baru lagi. Dulu yang bikin gagal juga salah satunya karena pemilihan kepala desa yang baru nggak setuju. Alasannya karena menguntungkan sebelah, yaitu masyarakat yang sadar wisata, lainnya engga. Padahal kan kalau seperti itu ya untuk pembangunan masyarakat juga sedikit demi sedikit melalui pembangunan ekonomi kreatif, tapi bertahap. Tapi tidak terlepas juga dari pemasukan untuk kas. *Nah*, kalau di Kungkuk ini lewatnya RW. Jadi orang yang belum dapat *income* dari pariwisata, sudah dapat dari kas itu, jadi sama-sama memiliki.”

Berdasarkan data di atas, kegagalan kerjasama dengan Desa Gunungsari dan pihak sponsor KWK, yaitu Jatim Park Foundation juga menjadi sebuah faktor penghambat. Kegagalan sebenarnya bukan dari pihak pengelola KWK, namun dari Pemerintah Desa Gunungsari yang merasa bahwa pengembangan ini hanya menguntungkan sebelah pihak, dan kurang menguntungkan Desa Gunungsari, yang sebenarnya keuntungan dari pembangunan dua desa wisata yang digabungkan adalah sama dan tidak menguntungkan salah satu pihak.

c) Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota Batu

Faktor penghambat yang kedua adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam pengembangan KWK. Salah satunya adalah bentuk pendampingan saat berlangsungnya pengembangan KWK. Jarang ada perwakilan pemerintah yang terjun langsung untuk mendampingi. Pihak pemerintah hanya datang saat ada kepentingan tertentu dari dinas terkait. Hal yang diharapkan dari pengelola kampung wisata, yang dikenal dengan komunitas LKP (Lembaga Koordinator Pariwisata) di Kampung Wisata Kungkuk adalah dengan adanya penyuluhan pariwisata di tahap awal merintis kampung wisata, untuk langkah selanjutnya harus ada monitoring dari pemerintah terkait (khususnya Dinas Pariwisata selaku dinas teknis pelaksana pengembangan desa wisata), hingga ke tahap evaluasi.

Pada awal tahun 2011 adalah waktu pembangunan dan pengembangan Kampung Wisata Kungkuk ini sedang giat-giatnya. Pada waktu itu Dinas Pariwisata juga memberikan tidak hanya motivasi dan dorongan, tetapi juga memberikan bantuan berupa pembangunan fasilitas umum penunjang seperti pilar-pilar untuk *outbond*, toilet umum, dan gapura pada pintu masuk Kampung Wisata Kungkuk. Tetapi itu tidak bertahan lama. Sekarang sudah jarang ada dorongan dari pemerintah.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Suwito Pamungkas selaku Sekretaris Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Punten, dan Koordinator Lembaga Koordinator Pariwisata (LKP) Kampung Wisata Kungkuk (KWK) pada wawancara tanggal 19 Agustus 2016 sebagai berikut:

“Menurut saya, pemerintah masih jalan setengah-setengah dalam pembangunan Kungkuk ini mas, karena yang namanya orang dinas itu tidak

selamanya disitu, seringkali kan kalau di dinas itu sering di mutasi, berubah-ubah. Selain itu menurut saya juga kalau orang dinas itu prinsipnya “*Pokok’e kerjo*”. Kalau yang paling menggebu-gebu mengembangkan ini waktu Dinas Pariwisata kepalanya masih Bu Mistin tahun 2011 sampai 2014. Itu pengembangan desa wisata tinggi *banget* mas, setelah itu sampai sekarang orang dinas jarang mendekat.”

Kurangnya perhatian dari pemerintah untuk pengembangan KWK ini berdasarkan data wawancara yang diperoleh diatas karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak bersifat kontinu, jadi monitoringnya dirasa masih kurang. Pihak KWK mengharapkan adanya kunjungan pemerintah yang rutin untuk monitoring hal apa saja yang sudah terlaksana untuk KWK, dan apa yang kurang dari KWK, sehingga pembangunan KWK dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

C. Pembahasan dan Analisis Data

1. Implementasi Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Pengembangan Kampung Wisata Kungkuk

a. Komunikasi antar aktor yang berperan aktif dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013

Komunikasi adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan dari pihak pertama (komunikator) kepada pihak kedua (komunikan). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Effendy (2006) yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media). Teori komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini lebih spesifik pada komunikasi kebijakan, yaitu proses penyampaian informasi kebijakan dari

pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*). Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Widodo (2013:97) informasi kebijakan publik harus disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan supaya para aktor kebijakan dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Serta agar para aktor kebijakan dapat mempersiapkan secara pasti dan akurat segala hal yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat diraih.

Adapun berbagai macam dimensi pada komunikasi kebijakan, yaitu dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki kebijakan publik dapat disampaikan kepada aktor dan sasaran (kelompok/individu) kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan juga konsistensi. Pemerintah daerah yang terlibat komunikasi pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) adalah Bappeda, Dinas Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Punten, dan Lembaga Kampung Wisata KWK.

Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo (2013:97), informasi kebijakan publik harus disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan supaya para aktor kebijakan dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, dan kelompok sasaran kebijakan. Dan yang terjadi di lapangan ditemukan bahwa peran Bappeda hanya sebagai penyedia payung hukum untuk pengembangan desa wisata di Kampung Wisata Kungkuk, Desa

Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kemudian proses komunikasi selanjutnya diturunkan pada Dinas Pariwisata selaku dinas teknis atau pelaksana pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK). Dinas Pariwisata sebagai dinas teknis berarti menaungi segala aktivitas pemerintahan hingga turun lapangan ke KWK di Desa Punten. Namun, Dinas Pariwisata tidak bekerja sendirian, Dinas Pariwisata bekerjasama dengan pokdarwis. Pokdarwis yang terkait dengan pengembangan KWK adalah Pokdarwis Desa Punten. Selanjutnya, segala kegiatan pengembangan dari Dinas Pariwisata dibantu oleh pokdarwis. Pokdarwis ini yang menjadi penghubung antara Dinas Pariwisata dan Lembaga Kampung Wisata di KWK. Tetapi, berdasarkan kenyataan di lapangan ditemukan adanya kekurangan kinerja yang dilakukan pokdarwis dalam pengembangan KWK. Sehingga menghambat pengembangan dari Kampung Wisata Kungkuk.

Selain itu, ditemukan dari kenyataan di lapangan dan hasil wawancara beberapa informan menjelaskan bahwa dalam pembangunan desa wisata, khususnya di KWK harus ada sinergi yang baik antara pemerintah (Dinas) dengan pemerintah desa dan pihak-pihak terkait lainnya. Namun, sebagian besar permasalahan muncul dikarenakan pemerintah desa yang kurang sinergi dengan keinginan pemerintah daerah untuk mengembangkan desa wisatanya, ditinjau dari partisipasi pemerintah desa yang kurang, dan dibuktikan dari adanya miskomunikasi antar kepala desa yang baru dengan yang lama.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori komunikasi kebijakan tersebut kurang sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena masih ditemukan adanya koordinasi yang kurang baik antar aktor yang terlibat dalam



pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

b. Sumber daya terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013

Sumber daya menurut Edward III, yang digunakan dalam penelitian ini ada empat macam, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya informasi, dan sumber daya peralatan/fasilitas. Penyampaian analisis disampaikan sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia menurut Edward III dalam Widodo (2013:98) menegaskan bahwa *“Probably the most resources in implementing policy is staff”*. Jumlah sumber daya manusia harus mencukupi jumlah dan memiliki kecakapan khusus sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing sesuai dengan asas efisiensi. Jadi, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia atau aparatur yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan. Walaupun peraturan pada pelaksanaan kebijakan jelas dan telah ditransformasikan secara tepat, namun jika dilihat segi kualitas dan kuantitas yang minim, maka pelaksanaan kebijakan publik tidak dapat berjalan dengan baik. beberapa aktor yang terlibat dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) ini adalah secara garis besar adalah Bappeda Kota Batu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, Pokdarwis Desa Punten, Lembaga Kampung Wisata KWK, dan masyarakat sekitar KWK.

Berdasarkan fakta di lapangan dan informasi yang didapatkan dari informan, dalam pengembangan desa wisata di KWK ini masih cenderung kurang jelas dan transparan terkait tim atau aktor siapa saja yang terlibat. Secara garis besarnya, dinas teknis yang menangani KWK, Desa Wisata Punten adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, namun ketika wawancara lebih lanjut dilakukan, tim khusus dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sendiri ternyata masih belum ada, hanya sebatas ajakan-ajakan informal. Dengan adanya ketidakjelasan tim pengembangan ini nantinya akan menimbulkan masalah-masalah kecil yang berakibat fatal bagi kelancaran kegiatan, seperti adanya kesalahpahaman maksud dan kinerja yang kurang.

Sumber daya manusia sebagai aktor kebijakan harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Disamping itu, aktor kebijakan juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Tidak tercukupinya sumber daya berarti peraturan tidak dapat ditegakkan, pelayanan tidak dapat disediakan, dan peraturan yang digunakan tidak dapat dikembangkan. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan selain harus tercukupi juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, dan perintah dari atasan. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa dalam pengembangan di Kampung Wisata Kungkuk (KWK) ditinjau dari teori Edward III poin sumber daya manusia masih kurang efektif dijalankan.

b) Sumber Daya Anggaran/Kuangan

Sumber daya anggaran atau keuangan diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan publik juga tidak maksimal. Pasalnya untuk memfasilitasi kebutuhan publik seperti pengadaan barang juga membutuhkan anggaran yang cukup. Hal ini ditegaskan oleh Edward III (1980) dalam Widodo (2013:100) dalam kesimpulan studinya yakni *“Budgetary limitations, and citizens opposition limit the quality of the services that implementator can be provide to the public”*. Kondisi tersebut juga menyebabkan para aktor kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan sebuah program. Dalam penelitian ini, didapatkan informasi tentang anggaran yang digunakan untuk pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) dirancang oleh Bappeda berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan. Anggaran berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Dari dana APBN terdiri dari APBD tingkat satu (1) provinsi, dan pusat yang macamnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), CSR, dan cukai. Sedangkan APBD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU). Adapun dukungan dari pihak swasta berupa bantuan sponsor. Pengembangan KWK di Desa Punten mendapat perhatian sponsor dari Jatim Park Foundation, namun dalam pelaksanaan kerjasama antara pihak Jatim Park Foundation dengan KWK mengalami hambatan.

Berdasarkan fakta di lapangan dan data hasil wawancara dengan beberapa informan terkait, pengembangan KWK dari pihak sponsor adalah usaha yang paling nyata dalam pengembangan KWK. *Site plan* pengembangan dari Jatim Park Foundation melibatkan dua desa, yaitu Desa Punten dan Desa Gunungsari yang rencananya akan dibangun wisata spa bunga yang dinamakan Punten Mekarsari. Namun rencana ini gagal direalisasikan karena tidak setujunya Pemerintah Desa Gunungsari dengan rencana tersebut. Pemerintah Desa menganggap rencana itu hanya menguntungkan pengusaha pariwisata saja, tidak untuk pihak Desa Gunungsari yang lainnya. Kegagalan secara sepihak ini sangat merugikan bagi pihak Kampung Wisata Kungkuk dan Desa Punten.

Keterbatasan sumber daya anggaran/keuangan akan mengganggu keberhasilan dari sebuah kebijakan. Selain program menjadi tidak optimal dijalankan, keterbatasan anggaran juga akan mempengaruhi disposisi para aktor kebijakan menurun, yang nantinya akan menjadi rawan oleh *goal displacement*. Oleh sebab itu, untuk memacu semangat dan meningkatkan disposisi para aktor kebijakan publik dalam menjalankan tugasnya, maka diperlukan sistem insentif yang akuntabilitas. Menurut Edward III di atas, yang dimaksud sumber daya anggaran atau keuangan adalah adanya pemberian insentif yang cukup untuk aktor kebijakan untuk menunjang kinerja agar maksimal. Namun dalam kenyataan di lapangan, dalam pengembangan KWK dijelaskan dalam poin pertama diatas yaitu sumber daya manusia bahwa dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu tidak membuat sebuah tim khusus yang jelas untuk menjalankan pengembangan KWK. Jadi, untuk pemberian insentif kepada siapa saja ini juga menjadi tidak

jelas. Namun di lapangan, peneliti mendapatkan permasalahan baru terkait sumber daya anggaran tentang gagalnya pengembangan dari pihak sponsor utama dari KWK, yaitu Jatim Park Foundation yang telah disebutkan diatas. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) ditinjau dari teori Edward III poin sumber daya anggaran/keuangan masih kurang efektif dijalankan.

c) Sumber Daya Peralatan/Fasilitas

Sumber daya peralatan/fasilitas adalah sarana yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, listrik, dan semua sarana terkait yang mendukung dalam pemberian pelayanan dan implementasi kebijakan sesuai dengan Edward III (1980) yang dikutip oleh Widodo (2013:102). Lebih lanjut, Edward III menegaskan "*physical facilities may also be critical resources in implementation won't be succeed*". Dengan demikian, keterbatasan fasilitas dan peralatan juga dapat mempengaruhi, bisa kemunduran atau bahkan kegagalan pelaksanaan sebuah implementasi kebijakan publik. Pasalnya, dengan keterbatasan fasilitas seperti informasi, menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, handal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan sistem yang akuntabilitas.

Dalam proses pengembangan KWK, Bappeda memberikan fasilitas berupa pembekalan atau kajian untuk menunjang kelancaran pengembangan. Selain itu, Bappeda juga memberikan fasilitas berupa payung hukum untuk menaungi pengembangan di KWK agar tidak terkendala tentang perizinan dan lain-lain. Kemudian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu selaku dinas teknis dari

pengembangan desa wisata, termasuk di KWK diharapkan juga memberikan kontribusi yang sesuai dengan perannya sebagai dinas teknis, karena berdasarkan keterangan dari informan dari KWK, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu seakan vakum dalam pengembangannya.

Fasilitas umum berupa gapura, toilet umum, dan peta wilayah di KWK sudah dibangun sejak awal nama Kampung Wisata Kungkuk (KWK) mulai dikenal oleh masyarakat luas. Berdasarkan fakta di lapangan, masyarakat KWK menginginkan adanya fasilitas berupa pendampingan atau monitoring rutin yang harus dilaksanakan oleh perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu agar pengembangan KWK bisa dilaksanakan secara maksimal. Jika disandingkan dengan teori implementasi publik menurut Edward III poin sumber daya peralatan/fasilitas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu telah memberikan pemenuhan fasilitas umum untuk kemajuan Kampung Wisata Kungkuk. Namun kenyataan di lapangan bahwa fasilitas umum tidak hanya berupa barang atau peralatan tambahan. Saat ini yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat KWK, mulai yang tergabung dalam Pokdarwis Desa Punten, hingga lembaga kampung wisata di KWK adalah pendampingan dan monitoring, yang dapat diartikan sebagai dukungan moral. Dengan adanya masukan dari masyarakat KWK ini harapannya dinas teknis melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat agar pengembangan KWK bisa berjalan dengan baik. Jadi, pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan teori, namun belum maksimal.

d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang relevan dan cukup akan berpengaruh pada cara menjalankan suatu kebijakan. Kewenangan juga merupakan sumber daya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan khususnya sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan keputusan dan meyakinkan masyarakat bahwa sebuah kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan bersama. Menurut Edward III (1980) dalam Widodo (2013:103) menjelaskan bahwa kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan memengaruhi lembaga tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari beberapa informan, dalam usaha pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, informasi umum disampaikan dalam visi dan misi walikota yang sedang menjabat, dan dituangkan dalam RPJMD Kota Batu. Selanjutnya, RPJMD diterima oleh Bappeda dan diberikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batu, termasuk salah satunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Kemudian, RPJMD diberikan kepada pemerintah desa wisata sebagai acuan untuk pengembangan desa wisata, termasuk di Kampung Wisata Kungkuk telah menerima dan mengetahui fungsi RPJMD tersebut. Informasi apapun tentang pembangunan dan pengembangan desa wisata telah jelas di dalam RPJMD. Jadi, untuk informasi dan kewenangan dengan alur komunikasi di atas sudah sesuai dengan teori Edward III poin sumber daya informasi dan kewenangan.

c. Disposisi dari para pelaku Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013

Menurut Edward III (1980) yang dikutip Widodo (2013:104) menjelaskan bahwa faktor penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan tidak hanya seberapa jauh pengetahuan aktor kebijakan tentang deskripsi tugasnya, tapi juga ditentukan kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan dan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga diri mereka sendiri, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka dapat mendalami dan memahaminya. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap kebijakan. Disposisi yang ditunjukkan oleh aktor pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) di Desa Punten berdasarkan data di lapangan menunjukkan ketidakmerataan, ada yang menunjukkan disposisi positif (menerima dan ikut berpartisipasi aktif) dan juga negatif (menolak bekerjasama).

Didasarkan pada teori implementasi kebijakan menurut Edward III, disposisi muncul dalam diri aktor kebijakan dikarenakan sebuah kebijakan yang akan dijalankan memiliki keuntungan bagi dirinya dan bagi pemerintah. Dalam fakta di lapangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu selaku dinas teknis masih terpecah belah, ada yang sudah disposisi dan ada yang belum.

Pasalnya, dalam tim pelaksana pengembangan desa wisata di KWK terdiri dari bermacam-macam dinas yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dinas PU dan Dinas Pariwisata sering *miss* komunikasi dan melempar tanggungjawab, misalnya dalam pembangunan jalan menuju lokasi KWK. *Miss* komunikasi sering muncul pada pembagian tugas yang telah diberikan oleh Dinas Pariwisata kepada Dinas PU, sedangkan dari Dinas PU belum bisa terfokus dalam pembangunan untuk pengembangan di KWK karena masih ada tanggungjawab lain yang juga sama-sama penting, sehingga hal inilah yang sering menghambat jalannya pengembangan di KWK.

Menurut Edward III (1980) yang dikutip oleh Widodo (2013:104), disposisi juga berarti sebuah kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi, kesesuaian di lapangan dengan teori ini masih setengah dijalankan. Aktor kebijakan harus secara penuh mendukung adanya pengembangan desa wisata di Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Permasalahan yang dihadapi adalah tidak meratanya disposisi di kalangan aktor. Jadi, kuncinya adalah harus disatukan terlebih dahulu. Dengan disposisi yang positif secara menyeluruh, maka pengembangan di KWK ini akan berjalan dengan baik, tentunya dengan terpenuhinya syarat-syarat lainnya yang mendukung pengembangan.

d. Struktur birokrasi dari pelaksana Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013

Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo (2013:106), implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisiennya struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup banyak aspek, diantaranya adalah struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut, dan hubungan organisasi tersebut dengan pihak luar organisasi dan sebagainya. Struktur organisasi merupakan fragmentasi dan termasuk standar operasional prosedur yang akan memudahkan dan menyamakan tindakan dari para aktor kebijakan dalam melaksanakan tugasnya.

Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya proses komunikasi, dimana para aktor kebijakan memiliki peluang yang besar untuk mengalami distorsi informasi dan instruksi. Fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan para pejabat pemegang peran strata atas untuk mengkoordinasi semua sumber daya yang relevan dalam sebuah yuridiksi, akibatnya terjadi pemborosan sumber daya. Dengan kata lain, organisasi pelaksana yang terfragmentasi atau terpecah belah akan mengalami distorsi pelaksanaan kebijakan. Semakin terpecah belah sebuah organisasi, maka semakin kacau koordinasi tim di dalamnya.

Pada kasus pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK), Dinas Pariwisata selaku dinas teknis atau dinas lapang yang memiliki wewenang secara penuh masih belum dapat memastikan siapa saja yang tergabung ke dalam tim pengembangan desa wisata. Dinas Pariwisata sendiri sebenarnya sudah

membentuk tim pengembang, namun dari dinas-dinas lain yang tergabung ke dalam tim atau bahkan orang dari dinas pariwisata sendiri masih sulit untuk dikoordinasi dan diberikan arahan, padahal di RPJMD Kota Batu telah disebutkan perihal itu

Permasalahan lain adalah dengan adanya struktur pada level desa yang kurang bekerja secara efektif, yaitu dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Pokdarwis Desa Punten menurut data pada wawancara salah seorang warga KWK masih bekerja hanya sebatas formalitas, justru yang berperan di KWK adalah Lembaga Koordinator Pariwisata (LKP) Kungkuk. Padahal, jika diurutkan berdasarkan strukturnya, Pokdarwis ada di atas LKP posisinya. Ini juga menjadi masalah yang rancu antara peran LKP dan Pokdarwis di KWK. Jadi, kesesuaian teori Edward III poin struktur birokrasi terhadap pengembangan KWK masih kurang baik, perlu ada perubahan pola komunikasi yang lebih baik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Perda Terhadap Pengembangan Kampung Wisata Kungkuk

a. Faktor Pendukung

1) Kondisi Alam

Menurut UU No. 10 Tahun 2009, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Salah satu daya tarik wisata utama di Kampung Wisata

Kungkuk (KWK), Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu adalah kondisi fisik alami wilayahnya yang indah. Hal ini memberikan kesan yang mendalam bagi tiap wisatawan yang datang. Kota Batu memiliki dua jenis wisata, yaitu alami dan buatan. Di KWK ini adalah salah satu contoh jenis wisata alami. Kondisi alam Kota Batu yang sejuk dan cocok dijadikan wisatawan sebagai kota tujuan wisata merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Namun masih sedikit wisatawan yang ingin berkunjung ke KWK jika dibandingkan dengan pariwisata buatan seperti Selecta dan Jatim Park yang telah ada sebelum desa wisata. Kampung Wisata Kungkuk memiliki kondisi alam Kota Batu.

2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor krusial yang sangat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan dalam suatu daerah. Menurut UNDP (1997:13), ada sembilan karakteristik dari *good governance* yang salah satunya adalah *Participation of Law*/Partisipasi. Masyarakat atau sebagai *stakeholder* harus memiliki suara atas pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik melalui lembaga yang sah dibangun atas kebebasan asosiasi, serta kapasitas partisipasi yang luas konstruktif. Masyarakat yang ikut berpartisipasi memberikan kesan masyarakat yang peduli dan tidak acuh terhadap sesuatu. Pada kasus pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK), partisipasi masyarakat desa terlihat antusias. Hal ini sudah dapat dijadikan indikator masyarakat madani yang peka akan pengembangan terhadap daerahnya.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya koordinasi sebagai tim teknis pengembangan di Kampung Wisata Kungkuk (KWK)

Implementasi Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk memiliki permasalahan yang membuatnya hanya jalan ditempat, yaitu kurangnya koordinasi aktor kebijakan. Dalam fakta di lapangannya, tim yang telah disusun dalam RPJMD Kota Batu hanya sebatas formalitas. Fakta yang terjadi adalah masih sering terjadi adanya pelemparan tanggungjawab, dan juga tumpang tindih fungsi. Koordinasi yang kurang baik berawal dari komunikasi yang tidak lancar. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada koordinasi, sebagaimana dinyatakan oleh Myers & Myers dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (Hasan 2005:18). Sedangkan menurut Pearce dan Robinson dalam Silalahi (2011:217), “Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit dalam satu usaha bersama, yaitu bekerja ke arah tujuan bersama”. Koordinasi yang kurang terjalin dengan baik akan rawan dengan berbagai bentuk permasalahan seperti salah paham, hilangnya kabar, sifat kurang bertanggungjawab, dan lain-lain. Hal ini memberikan dampak negatif bagi implementasi perda untuk pengembangan KWK.

2) Gagalnya kerjasama pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK)

Menurut Sulistyani (2004:129), Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk sebuah

ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan bersama dan adanya rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kapasitas di bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Kegagalan kerjasama Desa Punten, Desa Gunungsari, dan Jatim Park Foundation memberikan dampak yang cukup merugikan bagi Kampung Wisata Kungkuk (KWK). Rencana awal pengembangan dilakukan dengan cara penggabungan ikon wisata dua desa menjadi sebuah wisata baru berupa spa bunga yang diberi nama Punten Mekarsari. Kegagalan ini sempat menurunkan semangat Lembaga Koordinator Pariwisata (LKP) di Dusun Kungkuk. Disposisi yang tinggi dari pengelola pariwisata di KWK menjadikan pengelolaan LKP untuk Dusun Kungkuk tetap berjalan dengan baik.

3) Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota Batu

Sebuah program atau kebijakan bermula dari sebuah perencanaan yang matang. Perencanaan yang ada diformulasikan menjadi sebuah kebijakan yang siap dilaksanakan. Dari mulai terjadinya perencanaan bisa diartikan bahwasannya aktor implementasi kebijakan memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan kebijakan. Dalam kasus implementasi perda nomor 1 tahun 2013 untuk pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK), Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, menurut beberapa informan dalam penelitian ini, Pemerintah Kota Batu masih kurang sigap dalam menyikapi aspirasi dari masyarakat Dusun Kungkuk. Seperti halnya yang diinginkan masyarakat Kungkuk adalah adanya monitoring sekaligus evaluasi rutin yang dilakukan pemerintah untuk KWK.

Masyarakat berharap dengan adanya monitoring dan evaluasi tersebut dapat mempercepat penyelesaian masalah yang ada.

Hal lain yang diinginkan masyarakat Dusun Kungkuk adalah dibangunnya wahana di KWK yang dapat dinikmati sebagai fasilitas wisata setiap hari. Karena desa wisata termasuk dalam jenis pariwisata yang perlu persiapan sebelum didatangi oleh tamu, tidak bisa insidental. Contoh yang diharapkan seperti di Kampung Coklat, Blitar. Disana selain wisata petik coklat, menikmati beberapa hidangan dengan bahan dasar coklat juga disediakan fasilitas penunjang seperti spot-spot foto yang bagus, tempat duduk, wahana permainan yang ringan untuk tamu keluarga yang sifatnya insidental. Jika dibandingkan, saat ini KWK hanya mampu menerima tamu rombongan saja karena ada pemberitahuan sebelum wisatawan berkunjung.

Semua hal yang diprioritaskan pasti akan segera diupayakan. Dengan kurang sigapnya Pemerintah Kota Batu menyelesaikan permasalahan ini dapat dihubungkan dengan faktor disposisi pemerintah yang kurang. Menurut Edward III yang dikutip Widodo (2013:104), disposisi yaitu kemampuan serta kemauan yang kuat dari lembaga pelaksana program untuk melaksanakan program tersebut. Faktor penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan tidak hanya seberapa jauh pengetahuan aktor kebijakan tentang deskripsi tugasnya, tapi juga ditentukan kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan

kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian implementasi peraturan daerah Kota Batu nomor 1 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan studi di Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Perda dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk di Kota Batu jika dilihat dari pola komunikasi aktor implementasi kebijakannya cenderung berjalan kurang lancar. Komunikasi antar aktor kebijakan masih sering tidak cocok, bisa karena berbagai hal, salah satunya adalah kurang adanya skala prioritas yang harus dikerjakan. Pengembangan Kampung Wisata Kungkuk juga terhambat karena skala prioritas yang tidak ada, sehingga pengembangan desa wisata tidak fokus, dan menyebar secara luas, jadi sering ada permasalahan di Kampung Wisata Kungkuk yang terbengkalai dan belum bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Batu.
2. Sumber daya untuk implementasi perda dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk dilihat dari:
 - a. Sumber Daya Manusia. Dalam pelaksanaan kebijakan untuk pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) masih belum ada transparansi/kejelasan tentang siapa saja tim yang terlibat dan tupoksi

dari peran pekerjaannya masih berjalan diluar *Standard Operational Procedure* (SOP) yang diberlakukan.

- b. Sumber Daya Keuangan/Anggaran. Anggaran untuk pengembangan Kampung Wisata Kungkuk ada dan tercukupi, namun detail keuangannya kurang transparan kepada khalayak. Data yang didapatkan justru anggaran berupa pengembangan dari sponsor di Kampung Wisata Kungkuk, yaitu Jatim Park Foundation yang ternyata gagal untuk dilaksanakan.
- c. Sumber Daya Peralatan/Fasilitas. Pemenuhan bermacam fasilitas sudah diupayakan dan beberapa sudah dilaksanakan di lokasi Kampung Wisata Kungkuk seperti alat-alat outbond, toilet umum, papan nama, gapura selamat datang, peta, dan lain-lain. Namun masyarakat Kungkuk juga membutuhkan wahana ringan yang dapat digunakan untuk menjamu tamu keluarga atau perorangan. Selama ini, tamu yang berkunjung ke Kampung Wisata Kungkuk adalah tamu rombongan, jika ada tamu keluarga seringkali produk andalan di Kungkuk belum disiapkan oleh warga, karena butuh persiapan dan harus ada informasi jauh hari. Selain itu, masyarakat Kampung Wisata Kungkuk juga memerlukan adanya monitoring dan evaluasi (monev) rutin yang diadakan oleh Dinas Pariwisata untuk tetap membimbing pengembangan Kampung Wisata Kungkuk.
- d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan. Dalam implementasi perda untuk pengembangan di Kampung Wisata Kungkuk, informasi telah

tertuang dalam RPJMD Kota Batu dan sudah disebarluaskan kepada semua SKPD terkait secara merata dan adil. Dalam RPJMD dijelaskan semua cita-cita yang harus dicapai Kota Batu selama RPJMD itu masih berlaku, termasuk pengembangan desa wisata di Kota Batu. Penyampaian informasi yang jelas ini untuk mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang, atau wewenang ganda.

3. Implementasi perda dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk di Kota Batu jika ditinjau dari faktor disposisi masyarakat Kampung Wisata Kungkuk sudah baik, dilihat dari antusiasme warga ketika menyambut wisatawan dengan ramah, hal itu juga upaya untuk pengembangan Kampung Wisata Kungkuk agar lebih dikenal wisatawan yang luas dari sisi masyarakat. Namun jika dilihat disposisi dari pemerintah daerah masih kurang. Tidak semua SKPD yang tergabung dalam tim pengembangan desa wisata melaksanakan tugasnya dengan sigap, masih cenderung lamban untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kampung Wisata Kungkuk.
4. Struktur birokrasi dari implementasi perda dalam pengembangan Kampung Wisata Kungkuk di Kota Batu masih kurang jelas. Kurang jelasnya struktur birokrasi ini karena tidak adanya tim khusus dari Dinas Pariwisata selaku dinas teknis implementasi perda untuk pengembangan Kampung Wisata Kungkuk. Selama ini yang ada hanya sebatas pendampingan, jika ada inspeksi dari Dinas Pariwisata ke Kampung

Wisata Kungkuk hanya akan disambut warga dengan kurang antusias, karena menurut warga hal ini hanya formalitas.

5. Faktor yang mendukung implementasi perda untuk pengembangan Kampung Wisata Kungkuk di Kota Batu yang pertama adalah kondisi alam. Sudah bukan rahasia jika Kota Batu merupakan kota yang idel untuk menjadi Kota Tujuan Wisata (KTW). Didukung dengan hawa yang sejuk, masih terdapat banyak lahan hijau, beragam pariwisata alami maupun buatan, dan industri pariwisata lainnya seperti restoran, perhotelan, travel, dan lain-lain semua tersedia di Kota Batu, termasuk pula di Kampung Wisata Kungkuk yang juga menyediakan *guest house*, *outbond*, *camp ground*, wisata petik jeruk, perah susu, kuda-kudaan, dan lain sebagainya. Selain kondisi alamnya, partisipasi masyarakat di Kampung Wisata Kungkuk juga aktif dan ikut berperan untuk pengembangan Kampung Wisata Kungkuk.
6. Faktor yang menghambat implementasi perda untuk pengembangan Kampung Wisata Kungkuk di Kota Batu yaitu kurangnya koordinasi sebagai tim teknis, gagalnya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Batu, Desa Punten, Desa Gunungsari, dan Jatim Park Foundation. Selain itu juga dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah daerah atau disposisi yang minim terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, ada beberapa hal yang menjadi saran dari penulis, yaitu:

1. Harapan untuk jangka waktu dekat, Dinas Pariwisata Kota Batu membuat adanya tim khusus yang sinergi dan lebih terkoordinir agar aktor implementasi lebih bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai dinas teknis pengembangan Kampung Wisata Kungkuk. Jika tim telah tersusun dengan jelas, maka komunikasi dan koordinasi akan berjalan sesuai dengan prosedur dan lebih tertib, sehingga pembangunan akan lebih terfokus.
2. Dalam perjalanan implementasi perda untuk pengembangan Kampung Wisata Kungkuk, sebaiknya masing-masing aktor yang tergabung dalam tim teknis dibekali dengan *briefing* dan SOP tentang tupoksi masing-masing pemegang peran agar dapat bekerja lebih maksimal sesuai dengan SOP.
3. Anggaran pengembangan untuk Kampung Wisata Kungkuk (KWK) sebaiknya di transparansikan ke khalayak, terutama warga Dusun Kungkuk, Desa Punten berhak untuk mengetahui karena itu menyangkut daerah tempat hidup mereka, dan juga fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat pengelola desa wisata di KWK segera dipertimbangkan dan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran.
4. Perlu adanya penguatan *mindset* untuk menumbuhkan disposisi. Pemerintah Daerah Kota Batu mengadakan pelatihan tentang hubungan dan manfaat disposisi bagi tim pemerintah terhadap keberhasilan sebuah program, atau dengan upaya lain seperti pembekalan dan terjun lapang langsung untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Kampung Wisata

Kungkuk dan bekerjasama dengan warga pengelola kampung wisata untuk melayani wisatawan yang datang. Dengan demikian, disposisi perlahan akan sama-sama muncul menguat.

5. Dibentuk tim yang terdiri dari perwakilan masing-masing SKPD yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata sebagai dinas teknis sekaligus bersama pokdarwis dari Desa Punten dan Lembaga Koordinator Pariwisata (LKP) Dusun Kungkuk untuk gotong royong membangun dan mengembangkan Kampung Wisata Kungkuk.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Atantia Rizky. 2015. Jurnal: *Diskursus Kampung Wisata*. Malang
- Anonim. 2015. Enam Tantangan Pembangunan Industri di Indonesia. Diakses pada tanggal 28 Desember 2015 dari <http://indonesianindustry.com/enam-tantangan-pembangunan-industri-di-indonesia/>
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. Statistik Daerah Kota Batu 2016 (pdf.). Diakses pada tanggal 30 September 2016 dari <https://batukota.bps.go.id/>
- Effendy, Onong Uchjana. 2006. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: UI Press
- Hardjosoemantri, K. 2003. *Good Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*; Makalah untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional. Bali
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2006. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional Kerjasama CV. SOFA Mandiri dan Indonesia Print
- Kamil, Mustofa. "Strategi Kemitraan Dalam Membangun PNF Melalui Pemberdayaan Masyarakat". diakses pada 6 Januari 2016 dari http://file.upi.edu/Direktori/SPS/PRODI.PENDIDIKAN_LUAR_SEKOLAH/196111091987031-MUSTOFA_KAMIL/Bahan_kuliah/KEMITR-1.PDF
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara RI
- Lubis, Subaktian. tt. Sinergi Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam di Laut yang Diharapkan diakses pada tanggal 15 Maret 2016 dari <http://www.mgi.esdm.go.id/content/sinergi-pengelolaan-sumber-kekayaan-alam-di-laut-yang-diharapkan>

- Marpaung, Happy dan Herman Bahar. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Bandung
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Najiyanti, Sri dan S.R, Topo Susilo. 2011. Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (*The Sinergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development*). Jurnal dari Ketransmigrasian, 28 (2):113-124 diakses pada tanggal 14 Februari 2016 dari http://puslitbangtrans.depnakertrans.go.id/pdf/SINERGITAS_INSTANSI_PEMERINTAH_DALAM_PEMBANGUNAN_KOTA_TERPADU_MANDIRI.pdf
- Nisjar, S. Karhi. 1997. *Beberapa Catatan tentang Good Governance* (Jurnal Administrasi dan Pembangunan Volume 1 Nomor 2, 1997, Hal 119, Widodo). Surabaya: Insan Cendekia
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
- Pitana, I Gede dan Surya Diarta, I Ketut. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Priasukmana, Soetarso dan Mulyadin, MR. 2001. *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*. LIPI
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rohmad, Zaini, et al. 2009. *Kebijakan Kemitraan Publik, Privat, dan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Tentang Kebijakan Kemitraan Dalam Pengembangan Pariwisata di Malang Raya)*. Artikel Ilmiah FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama
- Siagian, Sondang P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi I, Cetakan Ketiga Belas. Jakarta: Bumi Aksara
- SJ Sumarto, Hetifah. 2004. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sofyandi, Herman dan Iwa Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*, Edisi Pertama, Cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Spillane, James J. 1989. *Pariwisata Indonesia; Siasat Ekonomi Dan Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar T. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2003. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Husaini dan Fajar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- UNDP. 1997. *Reconceptualising Governance*: Discussion paper No. 2, 1997. *The Principles of Good Governance*
- Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisataan* Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia Surabaya
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Yoeti, Oka A. 2000. *Pariwisata Berbasis Lingkungan*. Jakarta: PT Pertja
- Yoeti, Oka A. 2008. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN



FOTO KEGIATAN PENGUMPULAN DATA







PEDOMAN WAWANCARA

Bappeda dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

1. Peraturan apa yang digunakan sebelum menggunakan Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 untuk pengembangan desa wisata?
2. Bagaimana perkembangan desa wisata di Kota Batu? Bagaimana perkembangan Dusun Kungkuk?
3. Komunikasi aktor terkait:
 - a. Siapa saja aktor yang terlibat?
 - b. Apa saja peran masing-masing aktor?
 - c. Bagaimana hubungan atau pola komunikasi antar aktor?
4. Sumber Daya yang digunakan:
 - a. Sumber Daya Manusia
 - a) Melibatkan siapa saja dan jumlahnya berapa?
 - b) Apakah menggunakan elemen masyarakat desa sekitar?
 - c) Pemilihan SDM berdasarkan apa?
 - b. Sumber Daya Anggaran
 - a) Asal dana berasal dari mana?
 - b) Cukupkah anggaran tersebut untuk pelaksanaan program?
 - c) Cukupkah insentif yang didapat oleh aktor implementasi?
 - c. Sumber Daya Peralatan
 - a) Apakah difasilitasi dengan baik oleh dinas? Contohnya apa?
 - b) Berupa fasilitas umum atau seperti pembekalan kepada aktor khusus?
 - d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan
 - a) Apakah dalam pemberian informasi sudah jelas dan detail?
 - b) Untuk informasi tentang peran masing-masing aktor apakah sudah jelas?
5. Disposisi

- a. Apakah mayoritas SDM dan masyarakat desa setuju/menolak dengan program pengembangan KWK ini?
 - b. Jika ada yang tidak setuju, apa alasannya?
6. Struktur Birokrasi
- a. Struktur birokrasinya seperti apa?
 - b. Alur koordinasi antar aktor seperti apa?
7. Faktor
- a. Apa faktor pendukung program ini untuk KWK?
 - b. Apa faktor penghambat pelaksanaan program ini untuk KWK?
 - c. Bagaimana upaya pemerintah untuk meminimalisir hambatan tersebut?

Masyarakat Kampung Wisata Kungkuk (KWK)

1. Permasalahan seperti apa yang dihadapi KWK untuk pelaksanaan program pengembangan ini?
2. Sejauh mana pengembangan KWK dan keterlibatan pemerintah?
3. Seberapa jauh peran Jatim Park Foundation sebagai pihak sponsor dalam pengembangan KWK?
4. Apa peran Pokdarwis dalam pengembangan KWK?
5. Apakah Pokdarwis merupakan badan bentukan pemerintah yang menempel pada struktur pemerintah atau desa?
6. Apakah Pokdarwis memiliki AD ART?
7. Keadaan KWK dahulu dan sekarang seperti apa? Apakah ada perkembangan atau cenderung stagnan?



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 (TOURISM AND CULTURE OFFICE)
 Jl. Panglima Sudirman No.507 Block Office Gedung A Lantai 2
BATU 65313

LEMBAR DISPOSISI

1. RAHASIA

PENTING

3. RUTIN

Surat Dari : <i>Kesbangpol</i>	Diterima Tanggal : <i>6 Juli 2016</i>
Tanggal Surat : <i>29 Mei 2016</i>	Nomor Agenda : <i>704</i>
Nomor Surat : <i>078/0974/422.2016</i>	Diteruskan Kepada :
Perihal : <i>Izin Penelitian a.n. Paraditza Galang Km. Brawijaya Mlg.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas 2. Kabid Promosi dan Pemasaran Produk Wisata 3. Kabid Kebudayaan 4. Kabid Pengembangan Produk Wisata 5. Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

ISI DISPOSISI

Kesbang Umum

Unif. 7/6

Mbas Eka.

Esmanli 7/6





PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Jenderal Sudirman 507 Block office Gedung B Lantai 2

KOTA BATU

Batu, 23 Mei 2016

Nomor : 072/0974/1422.207/2016
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Dan
 Pembangunan Daerah Kota Batu
 2. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
 Kota Batu
 di-

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 04 Mei 2016 Nomor : 6908/UN10.3/AK/2016 Perihal Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : PARADITYA GALANG ALBYANANDA
 NIM : 125030100111042
 Jurusan : Administrasi Publik
 Fakultas/Universitas : FIA/Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

- Judul : Implementasi peraturan Walikota Batu Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat 2 Butir F Tentang penguatan Industri Pariwisata Berbasis Agrowisata
- Data Yang Dicari : - Permasalahan terkait judul
 - Peraturan turunan/lanjutan dari Perwalikota Batu No 20 Tahun 2014
 - Data -data pelengkap lain terkait judul penelitian
- Lokasi : 1. Bappeda Kota Batu
 2. Disparbud Kota Batu
- Peserta : -
- Waktu : 19 Mei 2016 s/d 19 Agustus 2016

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA BATU



THOMAS MAYDO, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19731209 199303 1 003

Tembusan :

- Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang





PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Mustari Nomor 6, Telepon/Fax. (0341) 511901

KOTA BATU

Batu, 13 Januari 2016

Nomor : 072/009/1422.207/2016
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Pra Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Pariwisata Dan
 Kebudayaan Kota Batu
 di-

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 12 Januari 2016 Nomor : 488/UN10.3/PG/2016 Perihal Ijin Pra Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : PARADITYA GALANG ALBYANANDA
 NIM : 125030100111042
 Jurusan : Administrasi Publik
 Fakultas/Universitas : FIA/Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Pra Riset pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Tentang Penguatan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal Dan Agrowisata

Data Yang Dicari : 1. Dasar hukum terkait selain Perwali Kota Batu
 2. Gambaran umum pengembangan dan penguatannya
 3. Aktor yang terlibat
 4. Permasalahan terkait judul yang diangkat
 5. Data perkembangan industri pariwisata
 6. Tahun terakhir di KotaBatu

Lokasi : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu
 Peserta : -
 Waktu : 14 Januari 2016 s/d 30 Januari 2016

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA BATU



THOMAS MAYDO, S.Sos

Pembina

NIP. 19731209 199303 1 003

Tembusan :

Yth.Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang



CURRICULUM VITAE

Nama : Paraditya Galang Albyananda
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 20 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Fakultas/Minat : Ilmu Administrasi Publik
NIM : 125030100111042
Universitas : Brawijaya
Alamat Asal : Krajan 2 Kembiritan RT 02 RW 05, Genteng,
Banyuwangi
Email : albyanandagalang@gmail.com
No. Telepon : 085749964052
Pendidikan Formal :
1. SDN 1 Genteng (2000-2006)
2. SMP Bustanul Makmur (2006-2009)
3. SMA Negeri 2 Genteng (2009-2012)
4. Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya (2012-2016)
Karya Ilmiah : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataaan (Studi Pada Kampung
Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan
Bumiaji, Kota Batu)

